PERKEMBANGAN PENDAPATAN PAJAK DAERAH DAN PREDIKSI PENDAPATAN PAJAK DAERAH

STUDI KASUS PADA PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi

Oleh :

Florentina Dyah Wanita Wulan

NIM : 932114024
NIRM : 930051121303120023

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
1997

Skripsi

PERKEMBANGAN PENDAPATAN PAJAK DAERAH DAN

PREDIKSI PENDAPATAN PAJAK DAERAH

STUDI KASUS PADA PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Oleh :

Florentina Dyah Wanita Wulan

NIM : 932114024

NIRM : 930051121303120023

Telah disetujui oleh :

Pembimbing I :

(Dra. Fr. Ninik Yudianti, M. Acc.) tanggal 4 Oktober 1997

Pembimbing II :

(Drs. Alex Kahu Lantum, M.S.) tanggal 8 Oktober 1997

Skripsi

PERKEMBANGAN PENDAPATAN PAJAK DAERAH DAN PREDIKSI PENDAPATAN PAJAK DAERAH

STUDI KASUS PADA PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Dipersiapkan dan ditulis oleh :

Florentina Dyah Wanita Wulan

NIM : 932114024

NIRM : 930051121303120023

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji

pada tanggal 18 Oktober 1997

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Panitia Penguji

	Nama lengkap	Tanda tangan
Ketua	Dra. Fr. Ninik Yudianti, M.Acc.	.....
Sekretaris	Drs. E. Sumardjono, MBA.	.....
Anggota	Dra. Fr. Ninik Yudianti, M.Acc.	.....
Anggota	Drs. Alex Kahu Lantum, M.S.	.....
Anggota	Drs. Th. Gieles, S.J.	.....

Yogyakarta 18 Oktober 1997

Fakultas Ekonomi

Universitas Sanata Dharma

Dekan

Drs. Th. Gieles, S.J.

" Keberanian bukan berarti tak ada rasa takut, melainkan menguasai rasa takut. Tanpa ketakutan, tak ada keberanian. "

Kupersembahkan :

- Bapak dan Ibu tercinta
- Mbak Nunuk, Mas Totok, Mas Wawan, Mbak Dian dan Yessi terkasih
- Mas Heru tersayang

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 18 Oktober 1997

Penulis

Florentina Dyah Wanita Wulan

ABSTRAK

FLORENTINA DYAH WANITA WULAN, PERKEMBANGAN PENDAPATAN PAJAK DAERAH DAN PREDIKSI PENDAPATAN PAJAK DAERAH, STUDI KASUS PADA PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui perkembangan pendapatan pajak daerah dari tahun anggaran 1992/1993 sampai tahun anggaran 1996/1997 dan prediksi pendapatan pajak daerah untuk tahun anggaran 1997/1998 sampai tahun anggaran 2001/2002.

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selama bulan Agustus sampai bulan September 1997. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah : (1). Untuk masalah pertama digunakan analisis harisontal, yaitu analisis dengan mengadakan perbandingan antara anggaran dan realisasi pendapatan pajak daerah untuk tahun yang sama dan antara realisasi dengan realisasi pendapatan pajak daerah untuk tahun yang berbeda, dari tahun anggaran 1992/1993 sampai tahun anggaran 1996/1997, (2). Untuk masalah kedua digunakan persamaan trend garis lurus. Dari persamaan trend tersbut, kemudian dilakukan penghitungan prakiraan/prediksi pendapatan pajak daerah untuk tahun anggaran 1997/1998 sampai tahun anggaran 2001/2002.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1). perkembangan pendapatan pajak daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun anggaran 1992/1993 sampai tahun anggaran 1996/1997 selalu mengalami peningkatan/kenaikan. Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dan pendaftaran Bea Balik Nama kendaraan Bermotor serta dikenakannya tarif pajak progresif bagi pemilik lebih dari satu kendaraan dengan nama dan alamat yang sama, (2). prediksi pendapatan pajak daerah, untuk tahun-tahun mendatang mengalami kecenderungan naik. Prediksi pendapatan pajak daerah untuk tahun anggaran 1997/1998 sampai 2001/2002 secara berurutan sebagai berikut: Rp 53.964.793.208,00, Rp 61.128.732.169,00, Rp 68.292.671.133,00, Rp 75.456.609.090,00, Rp 82.620.549.051,00.

ABSTRACT

FLORENTINA DYAH WANITA WULAN, THE DEVELOPMENT OF LOCAL TAX RECEIPTS AND PREDICTION OF LOCAL TAX INCOME, A CASE STUDY OF THE SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA (DIY)

The objective this thesis is to study the development of the Local Tax Receipts for the fiscal period of 1992/1993 up to 1996/1997 and the prediction of the local Tax Receipts for the period of 1997/1998 up to 2001/2002.

The research was done in the Fiscal Departement of DIY, from August 1997 up to September 1997. The data collecting techniques used are observation, interview, and documentation. While for data analyzing the techniques used are : (1). Horizontal analysis by comparing the budget and the realization of the local tax receipts every fiscal year from 1992/1993 up to 1996/1997, (2). Straight line trend equation. From that trend, a projection or prediction was made of the local tax receipts for the annual budget of 1997/1998 up to 2001/2002.

The research result show that : (1). Local tax receipts in DIY from 1992/1993 up to 1996/1997 show a continuous increase. This increase was caused by an increase in the number of motor vehicles increase in registration of ownership transfers of motor vehicles, and also because the progresive tax paid by owners of more than one motor vehicle registered under the same owner's name and address, (2). Prediction of the local tax receipts for the following years shows a tendency to increase. Prediction of the local tax receipts for the fiscal period of 1997/1998 up to 2001/2002 consecutively in as follow: Rp 53.964.793.208,00, Rp 61.128.732.169,00, Rp 68.292.671.133,00, Rp 75.456.609.090,00, Rp 82.620.549.051,00.

KATA PENGANTAR

Atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan atas bantuan dari semua pihak maka penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Perkembangan Pendapatan Pajak Daerah dan Prediksi Pendapatan Pajak Daerah Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Tingkat I Daerah Istimewa Yogyakarta.

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Segala daya telah penulis usahakan semaksimal mungkin, namun demikian penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal tersebut dikarenakan keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh penulis. Untuk itu saran serta kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan dari para pembaca sripsi ini.

Penulis menyadari pula bahwa terselesaikannya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak. Oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dra. Fr. Ninik Yudianti, M.Acc, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Drs. Alex Kahu Lantum, M.S, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan untuk penyempurnaan penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Dra. YFG. Agustinawansari, MM., Akt, yang telah memberikan masukan kepada penulis selama menyusun skripsi ini.

4. Pimpinan dan karyawan Dinas Pendapatan dan Dinas Anggaran daerah Pemerintah DaerahTingkat I Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah memberikan semua informasi dan data-data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Yohanes Purwanto, selaku Kepala Bagian Anggaran Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah memberikan informasi dan data-data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi.
6. Segenap Dosen serta seluruh staff karyawan Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi yang telah memberikan bantuan selama penulis duduk di bangku kuliah.
7. Teman-temanku "Jurusan Akuntansi Angkatan 1993" dan teman-teman Mudika Santo Yohanes Penginjil Somohitan, terutama Novi, Tina, Desi, Yuli dan Nora yang telah memberikan bantuannya selama penulis duduk di bangku kuliah.
8. Bapak, Ibu, Kakak-Kakakku serta Mas Heru yang telah memberikan bantuan baik berupa materiil maupun spiritual sehingga skripsi ini dapat terwujud.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam menyusun skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, pembaca pada umumnya, dan pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada khususnya.

Yogyakarta, Oktober 1997

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

HALAMAN PERSEMBAHAN iv

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA v

ABSTRAK vi

ABSTRACT vii

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI x

DAFTAR TABEL xiii

DAFTAR GAMBAR xiv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Batasan Masalah 3

C. Rumusan Masalah 3

D. Tujuan Penelitian 3

E. Batasan Istilah 4

F. Manfaat Penelitian 4

G. Sistematika Penulisan 5

BAB II LANDASAN TEORI..... 6

A. Pengertian Pajak..... 6

B. Fungsi Pajak..... 7

C. Pengelompokan Pajak..... 8

D. Syarat Pemungutan Pajak..... 10

E. Manfaat Pajak..... 11

F. Tata Cara Pemungutan Pajak..... 12

G. Tarif Pajak..... 15

H. Sumber-Sumber Pendapatan Daerah..... 16

I. Pajak Daerah..... 19

J. Tarif Pajak Daerah..... 23

BAB III METODOLOGI PENELITIAN..... 34

A. Jenis Penelitian..... 34

B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....34

C. Subyek Penelitian dan Obyek Penelitian..... 34

D. Teknik Pengumpulan Data.....35

E. Teknik Analisis Data.....35

BAB IV GAMBARAN UMUM PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I PROPINSI DIY

A. Sejarah Pembentukan DIY 40

B. Geografi 42

C. Penduduk 43

D. Kekayaan Alam 45

E. Nilai-Nilai Budaya 47

F. Ekonomi 49

G. Politik 52

BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN 56

A. Perkembangan Pendapatan Pajak Daerah dari Tahun Anggaran 1992/1993 sampai 1996/1997 57

B. Prediksi Pendapatan Pajak Daerah untuk Tahun Anggaran 1997/1998 sampai 2001/2002 70

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 80

A. Kesimpulan 80

B. Keterbatasan Penelitian 81

C. Saran 82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Halaman

1. Tabel 3.1

Perbandingan Pendapatan Pajak Daerah untuk tahun anggaran 1992/1993 sampai 1996/1997..... 36

2. Tabel 3.3

Perhitungan Trend Pendapatan Pajak Daerah 38

3. Tabel 5.1

Pendapatan Pajak Daerah tahun anggaran 1992/1993 sampai 1996/1997 57

4. Tabel 5.2

Perbandingan Pendapatan Pajak Daerah tahun anggaran 1993/1994 atas 1992/1993 58

5. Tabel 5.3

Perbandingan Pendapatan Pajak Daerah tahun anggaran 1994/1995 atas 1993/1994 61

6. Tabel 5.4

Perbandingan Pendapatan Pajak Daerah tahun anggaran 1995/1996 atas 1994/1995 63

7. Tabel 5.5

Perbandingan Pendapatan Pajak Daerah tahun anggaran 1996/1997 atas 1995/1996 65

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Grafik 3.1 Prediksi Pendapatan Pajak Daerah untuk tahun anggaran 1997/1998 sampai 2001/2002 38

Grafik 5.1 Anggaran Pendapatan Pajak Daerah dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah 68

Grafik 5.2 Prediksi Pendapatn PKB 73

Grafik 5.3 Prediksi Pendapatan BBNKB 76

Grafik 5.4 Prediksi Pendapatan Pajak Daerah 78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Disuatu negara yang sudah maju maupun di negara yang sedang berkembang selalu berusaha untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi penduduknya. Untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan tersebut agar dapat berjalan baik dan lancar, diperlukan sarana, tenaga dan juga dana yang cukup banyak. Bagi pemerintah daerah, dana tersebut salah satunya berasal dari pendapatan pajak daerah.

Disamping sarana, tenaga dan dana, ada yang tidak kalah penting agar tercapai kemakmuran dan kesejahteraan, yaitu diperlukan perencanaan yang baik. Perencanaan itu sendiri berarti penentuan tentang segala sesuatu yang akan dilaksanakan pada waktu yang akan datang. Sebelum membuat perencanaan, pemerintah perlu mengetahui dan menganalisa keadaan yang terjadi dengan pendanaan yang telah lalu dan bagaimana prakiraan pendanaan yang akan datang.

Dari pendanaan yang telah lalu, kita bisa menganalisa bagaimana perkembangan pendanaan dari tahun ke tahun dan juga dari periode ke periode. Apakah mengalami kenaikan atau penurunan? Apabila mengalami kenaikan apa penyebab kenaikan pendanaan dan seberapa besar kenaikan tersebut. Dan apabila mengalami penurunan, apa juga yang menyebabkan dan seberapa besar penurun tersebut. Setelah analisa ini dilakukan maka

perencanaan yang dihasilkan juga akan lebih baik, karena sudah diketahui penyebab-penyebab yang sekiranya kurang baik, sehingga untuk perencanaan selanjutnya hal - hal tersebut dapat dikurangi atau bahkan dapat dihilangkan. Dari analisa ini kita juga akan dapat mengetahui keadaan pendanaan yang telah lalu, sehingga kita dapat membuat perencanaan yang bagaimana yang sekiranya sesuai dengan kondisi yang telah ada.

Dari prakiraan pendanaan yang diperoleh untuk masa yang akan datang, maka pemerintah akan dapat membuat perencanaan ke depan dengan lebih baik dan lebih pasti. Jika pemerintah memperoleh gambaran bahwa pendanaan akan mengalami kenaikan yang cukup pesat dari satu periode ke periode lain, maka pemerintah akan menyusun kebijakan yang dikaitkan dengan pengembangan keadaan tersebut. Kebijakan yang diambil pemerintah tentunya akan berbeda apabila diketahui bahwa pendanaan di masa yang akan datang akan mengalami penurunan. Dengan demikian hasil dari peramalan pendanaan akan sangat besar artinya bagi penyusunan kebijakan yang akan disusun oleh pemerintah.

Oleh karena itu penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan pendapatan pajak daerah dan prediksinya (prakiraan) pendapatan pajak daerah untuk tahun - tahun mendatang. Dimana pendapatan pajak daerah ini merupakan bagian dari pendapatan asli daerah yang mempunyai peranan cukup besar bagi pendapatan dan pendanaan pemerintah daerah.

B. Batasan Masalah

Pembahasan pendapatan pajak daerah akan dibagi menjadi 3 sektor penerimaan, yaitu pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak lain-lain. Dalam pajak lain-lain memuat pendapatan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Tingkat I selain pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Alasan pembagian menjadi 3 sektor penerimaan pajak adalah karena penerimaan pendapatan pajak daerah dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor masing-masing mempunyai proporsi yang besar. Bagi sektor penerimaaan pajak yang memiliki proporsi kecil dimasukan dalam sektor pajak lain-lain.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perkembangan pendapatan pajak daerah dari tahun anggaran 1992 /1993 sampai 1996/1997 ?
2. Bagaimana prediksi pendapatan pajak daerah untuk tahun anggaran 1997/1998 sampai 2001/2002 ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perkembangan pendapatan pajak daerah dari tahun anggaran tahun 1992/1993 sampai 1996/1997.
2. Untuk mengetahui prediksi pendapatan pajak daerah untuk tahun anggaran 1997/1998 sampai 2001/2002.

E. Batasan Istilah

1. Pajak yaitu iuran kepada pemerintah dengan berdasarkan Undang-Undang dimana manfaatnya tidak langsung dapat dirasakan oleh masyarakat.
2. Pajak daerah yaitu pungutan daerah menurut peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiyaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik.
3. Prediksi adalah suatu prakiraan dimasa yang akan datang.

F. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait yaitu :

1. Bagi Pemerintah Daerah

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan evaluasi terhadap perencanaan kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah.

2. Bagi Universitas

   Sumbangan bahan referensi dibidang perpajakan yang dapat digunakan untuk menambah pengetahuan bagi mahasiswa.

3. Bagi Penulis

   Menambah pengalaman di bidang perpajakan dan menerapkan teori yang diperoleh dari bangku kuliah dengan keadaan yang sebenarnya.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab I berisi tentang latar belakang masalah, batasan masalah, penulisan masalah, tujuan penelitian, batasan istilah dan sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab II berisi tentang teori-teori dari hasil studi pustaka yang dapat dijadikan dasar untuk mengolah data-data tentang pendapatan pajak daerah.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab III berisi tentang jenis penelitian, subyek penelitian, jenis data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV GAMBARAN UMUM PEMDA TINGKAT I DIY

Bab IV berisi tentang data-data yang diperoleh dari Pemda Tingkat I DIY.

BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab V akan membahas analisis data yang diperoleh dari Pemda Tingkat I DIY dengan menggunakan metode dan teknik yang telah diuraikan pada bagian metodologi penelitian.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Bab VI berisi kesimpulan dari seluruh langkah proses pembahasan dan analisis data hasil penelitian serta berisi beberapa saran yang diharapkan dapat berguna bagi pihak Pemda Tingkat I DIY.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Tubagus Chairil Amadi Zandjani dalam buku Perpajakan 1992 (hal. 1) yaitu :

> Pajak adalah iuran negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara dalam menjalankan pemerintahan.

Sedangkan definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Sumitro, SH. yang telah dikutip oleh Drs. Mardiasmo, MA., Akt. dalam bukunya yang berjudul Perpajakan, 1995 (hal.1) yaitu :

> Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan membayar pengeluaran umum).

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak mempunyai unsur-unsur :

1. Iuran dari rakyat kepada negara

   Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut bukan berupa barang melainkan berupa uang.

2. Berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan

   Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Dapat dipaksakan

   Dapat dipaksakan berarti apabila utang pajak tidak terbayar, maka utang tersebut dapat ditagih dengan kekerasan, seperti surat paksa, lelang, sita dan sandera.

4. Tanpa jasa timbal balik (kontra prestasi) atau prestasi kembali dari negara yang secara langsung dapat ditujukan dengan adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah.

5. Digunakan untuk membiayai rumah tangga yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat.

B. Fungsi Pajak

Pajak yang berlaku saat ini memiliki dua fungsi yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi *reguler*. Dalam fungsi *budgetair* yaitu sebagai alat atau sumber untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara dan bertujuan untuk membiayai pengeluaran negara yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Sedangkan fungsi *reguler* yaitu sebagai pengatur atau pelaksana kebijaksanaan pemerintah dalam sosial dan ekonomi.

Untuk fungsi *reguler*, pelaksanaannya dengan mengadakan perubahan tarif dan memberikan atau sebaliknya yang ditujukan kepada masalah tertentu. Misalnya pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras dan terhadap barang-barang mewah. Hal ini bertujuan untuk mengurangi gaya hidup konsumtif bagi masyarakat. Di samping itu pemerintah juga menerapkan tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% yang bertujuan untuk

mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia. Dengan melihat itu semua, berarti pemerintah berusaha mengatur rakyatnya melalui pajak, sehingga akan terjadi keselarasan antara masyarakat yang satu dengan yang lain.

C. Pengelompokan Pajak

Untuk memudahkan pemahaman tentang pajak, maka pajak dapat dikelompokan menjadi tiga, yaitu :

1. Menurut lembaga pemungutannya:

   a. Pajak Pusat

      Pajak Pusat atau pajak negara adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat (Direktorat Jendral Pajak) dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan (APBN). Contoh Pajak Pusat adalah PPh, PPN, PPn-BM dan bea materai.

   b. Pajak Daerah

      Yaitu pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah , baik pemerintah daerah tingkat I maupun pemerintah daerah tingkat II yang hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran dan pembangunan daerah (APBD). Contoh pajak daerah adalah pajak pembangunan I, pajak reklame, pajak bahasa asing (PBA) dan pajak kendaraan bermotor.

2. Menurut Golongannya

   a. Pajak langsung

Pajak langsung adalah pajak yang dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dipungut secara berkala (periodik). Contoh pajak langsung adalah PPh dan PBB.

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang dipungut kalau ada peristiwa pembuatan tertentu dan pembayar pajak dapat melimpahkan beban pajaknya kepada orang lain. Contoh pajak tidak langsung adalah PPN, PPn-BM dan Bea Materai.

3. Menurut Sifatnya

a. Pajak Subyektif

Pajak Subyektif adalah pajak yang pengenaannya pertama-tama memperhatikan pribadi wajib pajak (subyek) kemudian menetapkan obyek pajaknya. Keadaan pribadi wajib pajak (daya pikulnya) sangat mempengaruhi besarnya jumlah pajak yang terutang. Contoh pajak subyektif adalah PPh.

b. Pajak Obyektif

Pajak Obyektif adalah pajak yang pengenaannya pertama-tama memperhatikan obyeknya, yaitu berupa benda, keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang menyebabkan utang pajak kemudian ditetapkan subyeknya, tanpa mempersoalkan apakah subyek tersebut bertempat tinggal di Indonesia atau tidak. Contoh pajak obyektif adalah PPN dan PPn-BM serta PBB.

D. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan).

   Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, maka UU dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan dalam pelaksanaannya, yakni memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan UU (syarat yuridis).

   Di Indonesia diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian.

   Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan prekonomian masyarakat

4. Pemungutan pajak harus efisien.

   Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus bisa ditekan, sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

   Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-Undang perpajakan yang baru. Contohnya pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (orang pribadi).

E. Manfaat Pajak

Pajak bermanfaat sebagai sumber penerimaan negara. Dalam menjalankan tugas rutin dalam pembangunan, negara memerlukan biaya. Biaya tersebut antara lain diperoleh dari penerimaan pajak. Pengeluaran rutin seperti belanja barang, pemeliharaan dan sebagainya, biayanya berasal dari penerimaan pajak Sedangkan pengeluaran pembangunan berasal dari tabungan pemerintah, yaitu penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah tersebut setiap tahun harus meningkat sesuai dengan kebutuhan pembiayaan pembangunan. Penerimaan dalam negeri terdiri dari penerimaan migas dan non migas, dimana penerimaan non migas ini sebagian besar penerimaan yang bersumber dari penerimaan pajak.

Di samping manfaat diatas, pajak juga bermanfaat sebagai salah satu alat pemerataan pendapatan dan juga sebagai pendorong investasi. Pengenaan pajak dengan tarif progresif dimaksudkan untuk mengenakan pajak yang lebih tinggi pada golongan yang lebih mampu. Dana yang dipindahkan dari

sektor swasta ke sektor pemerintah digunakan untuk membiayai proyek yang terutama dinikmati oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah, seperti sarana peribadatan, pendidikan, kesehatan, transportasi dan keamanan. Pajak sebagai pendorong investasi sebagaimana yang telah disebutkan dalam fungsi pajak *budgetair*, apabila masih ada sisa dari dana yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara (rutin), maka kelebihan tersebut dapat dipakai untuk tabungan pemerintah.

F. Tata Cara Pemungutan Pajak

1. *Stelsel* Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 *stelsel* :

a. *Stelsel* Nyata (*Riel Stelsel*)

Pengenaan pajak berdasarkan pada objek (penghasilan yang nyata) sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. *Stelsel* nyata mempunyai kelebihan yaitu pajak yang dikenakan lebih realistis, sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

b. *Stelsel* Anggapan (*Fictieve Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terhutang untuk tahun pajak berjalan.

Kebaikan *stelsel* ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. *Stelsel* Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara *stelsel* nyata dan *stelsel* anggapan. Pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah, sebaliknya jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

2. Asas Pemungutan Pajak

a. Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri.

b. Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

c. Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara, misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan pada setiap orang

yang bukan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia. Asas ini berlaku untuk wajib pajak luar negeri.

3. Sistem Pemungutan Pajak

a. *Official Assessment System.*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak . Ciri-ciri sistem ini adalah :

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terhutang ada pada fiskus.
2) Wajib pajak bersifat pasif.
3) Hutang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak untuk memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terhutang. Ciri-ciri sistem ini adalah :

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terhutang ada pada wajib pajak sendiri.
2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang.
3) Fiskus tidak ikut campur tangan, hanya mengawasi.

c. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan), untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak. Ciri-ciri sistem ini adalah wewenang menentukan besarnya pajak yang terhutang adalah pada pihak ketiga selain fiskus dan wajib pajak.

G. Tarif Pajak

1. Tarif sebanding atau proporsional

   Tarif berupa prosentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak. Contohnya adalah untuk penyerahan barang kena pajak di dalam daerah akan dikenakan pajak pertambahan nilai sebesar 10 %.

2. Tarif tetap

   Tarif berupa jumlah yang tetap atau sama terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terhutang tetap. Contohnya adalah besarnya tarif bea materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp 1.000,00.

3. Tarif progresif

   Prosentase tarif yang dikenakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Contohnya adalah Pasal 17 Undang-Undang PPh 1995 yaitu :

Lapisan penghasilan kena pajak	Tarif
≤ Rp 25.000.000,-	10 %
> Rp 25.000.000,- s/d Rp 50.000.000,-	15 %
> Rp 50.000.000,-	30 %

4. Tarif degresif

   Prosentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

H. Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

1. Pengertian Pendapatan Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

   Sumber pendapatan daerah meliputi tidak saja pendapatan asli daerah, akan tetapi termasuk pula sumber pendapatan daerah yang berasal dari penerimaan pemerintah pusat, yang dalam realisasinya dapat saja berbentuk bagi hasil penerimaan pajak dari pusat atau lainnya yang berbentuk subsidi (sokongan) untuk keperluan pembangunan daerah dan sebagainya. Sumber pendapatan asli daerah berbeda dengan pendapatan daerah (secara global). Sebab dari semua sumber-sumber pendapatan hanya sebagian saja yang merupakan pendapatan asli daerah. Contoh dari penerimaan asli daerah adalah penerimaan dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari perusahaan daerah, dan lainnya yang merupakan yang merupakan sumber pendapatan asli daerah itu yang digali atau dihasilkan oleh daerah bersangkutan dan merupakan pula pendapatan

daerah yang sah. Pajak daerah paling tidak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. tidak boleh bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah pusat,
b. sederhana,
c. jenisnya tidak terlalu banyak,
d. lapangan pajaknya tidak melampaui/.mencampuri pajak pusat,
e. berkembang sejalan dengan perkembangan kemakmuran di daerah tersebut,
f. biaya administrasinya rendah,
g. beban pajak relatif seimbang,
h. dasar pengenaan yang sama diterapkan secara nasional.

2. Sumber keuangan daerah

a. Sumber keuangan daerah menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 1948, yaitu :

1) pajak daerah,
2) hasil perusahaan daerah,
3) pajak negara yang diserahkan kepada daerah,
4) dan lain-lain.

b. Sumber keuangan daerah menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1957, yaitu :

1) pajak daerah,
2) retribusi daerah,
3) pendapatan negara yang diserahkan kepada daerah,

4) hasil perusahaan daerah.

c. Sumber keuangan daerah menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 1965, yaitu :

1) hasil perusahaan daerah dan sebagian hasil perusahaan negara,

2) pajak-pajak daerah,

3) retribusi daerah,

4) pajak negara yang diserahkan kepada daerah,

5) bagian dari hasil pajak pemerintah pusat,

6) pinjaman ,

7) dan lain-lain usaha yang sesuai dengan kepribadian nasional.

Dengan Undang-Undang, kepada daerah dapat pula diserahkan :

1) pajak negara,

2) sebagian atau seluruh penerimaan pajak negara,

3) sebagian dari pendapatan bea cukai,

4) sebagian dari hasil perusahaan daerah,

5) subsidi, ganjaran, dan sumbangan.

d. Sumber keuangan daerah menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1974, yaitu :

1) Sumber keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah, terdiri dari :

(a) hasil pajak daerah,

(b) hasil retribusi daerah,

(c) hasil perusahaan daerah,

(d) lain-lain hasil usaha daerah yang sah.

2) Pendapatan berasal dari pemberian pusat yang terdiri dari :

(a) sumbangan dari pemerintah pusat,

(b) sumbangan lainnya yang diatur dengan peraturan perundang-undangan,

(c) lain-lain pendapatan yang sah.

I. Pajak Daerah

1. Dasar hukum

Dasar hukum diberlakukannya peraturan umum pajak daerah ini adalah Undang-Undang No. 11 Drt. Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 No. 56, Tambahan lembaran Negara No. 1287) yang dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 N0. 3, Tambahan Lembaran Negara No. 2124) telah ditetapkan menjadi Undang-Undang.

2. Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Penetapan pengertian itu dianggap perlu, karena sehubungan dengan pengesahan peraturan pajak daerah yang berada di tangan pemerintah pusat. Suatu hal yang penting dengan adanya Undang-Undang tersebut adalah adanya hasrat dan tujuan dari pemerintah pusat untuk memberikan sedapat mungkin batas-batas tertentu antara lapangan

pajak pusat dengan daerah. Baik pusat dan daerah dapat mengusahakan lapangan atau sumber pajak seluas-luasnya dan di samping itu dapat pula digali sumber-sumber baru.

3. Mengadakan Pajak

Peraturan pajak daerah yang telah ditetapkan akan memuat tentang hal-hal yang dikenakan pajak (obyeknya) dan termasuk pula dasar pengenaannya. Demikian pula jumlah pajaknya, penunjukkan wilayah dimana pajak daerah itu dipungut, syarat-syarat mengenai kewajiban membayar pajak harus ditentukan dalam peraturan pajak yang akan ditetapkan itu. Mengenai obyek pajak, seperti halnya barang kebutuhan sehari-hari tidak boleh langsung dikenakan pajak daerah. Arti dari kehidupan sehari-hari tidak dapat ditentukan dengan pasti, dan pengertian ini di suatu daerah mungkin berlainan dengan daerah lainnya. Ada kalanya bahwa aturan pajak daerah dapat saja menyebabkan kesulitan-kesulitan dalam penerapannya. Karena itu, Undang-Undang ini mengatur pula tentang beberapa hal :

a. Pajak daerah tidak boleh merupakan rintangan keluar masuknya pengangkutan barang.
b. Tidak boleh diadakan perbedaan atau pemberian keistimewaan yang menguntungkan perseroan, golongan dan agama. Termasuk duta dan konsul asing tidak dapat diberikan pembebasan dari pajak daerah, kecuali dengan Keputusan Presiden.

4. Lapangan Pajak

Lapangan pajak daerah adalah lapangan yang belum digunakan oleh pusat. Lapangan pajak dapat dibagi atas lapangan pajak negara, lapangan pajak daerah (tingkat atasan dan bawahan), dan lapangan pajak yang belum digunakan. Dalam hal lapangan pajak belum digunakan, pusat dan daerah dapat mencari obyek yang akan dikenakan pajak. Selanjutnya dengan memandang kepentingan umum, dapat saja pemerintah pusat menarik obyek yang telah dikenakan oleh daerah. Dalam hal ini sebaiknya pusat memberikan ganjaran kepada daerah supaya sumber keuangan daerah tidak labil. Demikian pula dalam hal pemerintah daerah tingkat atasan yang menarik obyek pajak daerah tingkat bawahannya. Sebaliknya pusat dapat menyerahkan obyek-obyek pajaknya kepada daerah. Contohnya penyerahan pajak kendaraan bermotor kepada daerah tingkat satu.

5. Pajak yang dapat dipungut Daerah Tingkat I

Pajak yang ditunjuk berdasarkan Undang-Undang :

a. Pajak kendaraan bermotor
b. Bea balik nama kendaraan bermotor
c. Pajak atas ijin menangkap ikan di perairan umum di dalam wilayahnya,
d. Pajak sekolah yang semata-mata diperuntukkan membiayai pembangunan rumah-rumah sekolah rakyat (sekolah dasar), yang menjadi beban pemerintah daerah,
e. *opsen* atas pokok pajak kekayaan (Ordonansi pajak kekayaan 1932),

f. Pajak rumah tangga (PRT)

6. Pengesahan pajak daerah

Peraturan pajak Daerah Tingkat I tidak dapat berlaku sebelum disahkan oleh presiden. Lembaran peraturan pajak daerah yang ditandatangani oleh ketua DPRD Tingkat I dikirim dengan disertai rancangan peraturan pajak daerah dan surat-surat pengesahan DPRD Tingkat I, serta kutipan notulen rapat DPRD Tingkat I mengenai pembicaraan dan penetapan peraturan pajak daerah yang telah disahkan satu dan lainnya menurut petunjuk Menteri Dalam Negeri.Dalam tempo 8 hari setelah diterima peraturan pajak daerah Mendagri yang menerimanya akan memberi kabar penerimaan kepada Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan. Dalam jangka waktu 3 bulan sesudah diterima peraturan pajak daerah yang dimaksud akan diberikan keputusan sehubungan dengan permintaan pengesahan itu. Tentang pemberian keputusan pengesahan ini akan diberikan kabar kepada Dewan Pemerintah Daerah (Kepala Daerah) yang bersangkutan, disertai dengan peraturan daerah yang dibubuhi tanda pengesahan. Jangka waktu 3 bulan itu dapat diperpanjang 3 bulan lagi, dan akan diberikan kabar kepada Dewan Pemerintah Daerah (Kepala Daerah) yang bersangkutan. Jika tidak diberikan pengesahan oleh Presiden setelah 6 bulan sejak diterima, maka peraturan ini dianggap sah. Apabila tidak diberikan pengesahan, Presiden atau Mendagri akan memberitahukan kepada Dewan Pemerintah (Kepala Daerah) yang bersangkutan dengan menyebut alasan penolakannya.

J. Tarif Pajak Daerah

Tarif pajak daerah ini ditentukan dalam peraturan pajak atau ditentukan sendiri oleh pemerintah daerah. Pajak-pajak tersebut adalah:

1. Pajak Kendaraan Bermotor
   a. Dasar hukumnya
      1) Adalah ordonansi pajak kendaraan bermotor 1934 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan UU tahun 1959.
      2) Berdasarkan UU no.32/1957 yo peraturan pemerintah no.3/1957 pajak kendaraan bermotor diserahkan pada Pemerintah Daerah tingkat I
   b. Pengertian
      1) Pajak kendaraan bermotor adalah merupakan pungutan daerah atas pemilikan kendaraan bermotor untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pungutan ini berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
      2) Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu yang biasanya dipergunakan untuk angkutan orang atau barang berikut kereta gandeng termasuk kendaraan khusus alat-alat berat atau alat-alat besar yang dipergunakan di darat dan digerakkan oleh motor dengan bahan bakar bensin, gas atau bahan bakar lainnya, tidak termasuk yang berjalan di atas rel.

3) Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak dipergunakan untuk melaporkan data obyek dan wajib pajak sebagai dasar perhitungan dan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang terhutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4) Nota Pajak adalah perhitungan besarnya pajak kendaraan bermotor yang terhutang yang harus dibayar oleh wajib pajak berfungsi sebagai ketetapan pajak.

5) Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukakan tagihan pajak dan atau sanksi berupa bunga dan benda administrasi.

c. Obyek pajak kendaraan bermotor

1) Obyek pajak kendaraan bermotor adalah :

a) Kendaraan bermotor yang berada dan terdaftar di daerah.

b) Kendaraan bermotor yang berada di daerah lebih dari 90 hari berturut-turut.

c) Pemilik Kendaraan Bermotor wajib melaporkan kendaraan bermotor tersebut kepada Gubernur.

2) Obyek Pajak yang dikecualikan dari Pajak Kendaraan Bermotor adalah :

a) Kendaraan bermotor yang dimiliki oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah tingkat I, Pemerintah Daerah tingkat II, dan Pemerintah Desa, tidak termasuk dibebaskan adalah kendaraan

bermotor yang dimiliki oleh BUMN, BUMD, dan kendaraan-kendaraan yang dikomersialkan.

b) Kendaraan bermotor yang dimiliki oleh perwakilan diplomatik, perwakilan konsuler, perwakilan PBB, serta Badan-Badan Khusus atau Organisasi Internasional dan Tenaga Ahli Asing yang diperbantukan kepada Pemerintah Republik Indonesia.

c) Kendaraan Bermotor baru yang berada di tangan pabrikan atau pedagang kendaraan bermotor dan semata-mata untuk dijual dan dipamerkan,.

d) Ambulans, Mobil Jenasah dan Pemadam Kebakaran.

e) Kendaraan Bermotor yang disita atau disegel oleh negara.

UNIVERSITAS SANATA DHARMA PERPUSTAKAAN YOGYAKARTA

c. Subyek Pajak Kendaraan

Yang menjadi subjek pajak adalah orang atau badan yang memiliki kendaraaan bermotor dan berdomisili di daerah.

d. Dasar perhitungan dan tarip pajak

1). Untuk menghitung besarnya pajak yang terhutang taripnya berdasarkan jenis, fungsi, isi silinder (tenaga kuda), tahun pembuatan dan nilai kendaraan bermotor.

2). Untuk menetapkan besarnya tarip pajak berdasarkan peraturan daerah, sesuai pedoman Keputusan Menteri Dalam Negeri.

3). Untuk pemilikan kendaraan bermotor jenis penumpang (sedan, jeep, minibus) perorangan yang pemilikannya lebih dari satu dikenakan tarip pajak progresif sebesar 120% untuk pemilikan kendaraan

kedua, 140% untuk kepemilikan ketiga, dan 160% dari tarip pajak untuk kepemilikan kendaraan keempat dan seterusnya.

e. Saat pendaftaran dan pembayaran

Kewajiban mendaftarkan pajak yang terutang:

1). Bagi kendaraan bermotor baru, 14 hari setelah tanggal penyerahan dalam hak milik, sampai dengan tanggal berakhirnya masa pajak. Bagi kendaraan bermotor yang pindah keluar daerah 30 hari sejak tanggal fiskal antar daerah.

2). Apabila kewajiban memasukan SPT tidak dipenuhi tepat pada waktunya dikenakan tambahan sebesar 25% dari pokok pajak.

Kewajiban membayar pajak terhutang:

1). Kewajiban membayar pajak yang terhutang pada saat mendaftarkan atau selambat-lambatnya pada jatuh tempo pembayaran. Pembayaran dilakukan di kantor kas daerah atau tempat lain yang ditentukan oleh Gubernur sesuai dengan aturan pembayaran yang tercantum dalam nota pajak, SKP dan STP.

2). Kepada wajib pajak yang telah melunasi pajak kendaraan bermotor setahun kedepan diberikan pening pajak sebagai tanda lunas pajak.

f. Denda dan penagihan

Keterlambatan pembayaran pajak yang telah ditetapkan dalam nota pajak, SKP yang melampaui jatuh tempo dikenakan denda sebesar 5% sebulan dari pokok pajak untuk setiap keterlambatan selama-lamanya 12 bulan. Jumlah pajak dan dendanya yang tercantum dalam nota

pajak, SKP dapat ditagih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. Keberatan dan banding

Wajib pajak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Gubernur atas ketetapan pajak, paling lambat 90 hari setelah nota pajak, SKP diterima. Pengajuan keberatan tidak menangguhkan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang telah ditetapkan. Gubernur berwewenang menolak atau menerima sebagai atau seluruhnya terhadap keberatan tersebut diatas.

h. Ketentuan pidana

Wajib pajak yang mengisi SPT tidak jelas, tidak benar dan tidak lengkap, sehingga menimbulkan kerugian pada pemerintah daerah diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000. Disamping ancaman tersebut diatas kepada yang bersangkutan tetap diwajibkan membayar pajak kendaraan bermotor dan bagi wajib pajak yang karena kelalaian tidak melaporkan objek pajaknya diancam pidana kurungan 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000.

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN Kbm)

a. Dasar Hukum

1). Bea balik nama kendaraan bermotor dipungut berdasarkan UU no.27 prp tahun 1959 (peraturan pemerintah pengganti UU no.27/1959 setelah disahkan dengan UU no.1/1961).

2). Berdasarkan UU no.10/1968 jo peraturan pemerintah no.5/1969 BBNKB diserahkan kepada pemerintah daerah tingkat I.

b. Pengertian

1). Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) adalah pajak yang dipungut atas penyerahan kendaraan bermotor dalam hak milik.

2). Penyerahan kendaraan bermotor adalah penyerahan kendaraan dalam hak milik sebagai akibat perjanjian dua pihak atau lebih atau perbuatan-perbuatan sepihak atau keadaan termasuk warisan dan hibah.

c. Objek bea balik nama kendaraan bermotor

1). Objek BBNKB adalah penyerahan kendaraan bermotor dalam hak milik.

2). Objek BBNKB yang dibebaskan adalah:

a). Penyerahan kendaraan bermotor kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah tingkat I, pemerintah daerah tingkat II dan pemerintah desa. Sedangkan yang tidak termasuk dibebaskan adalah kendaraan bermotor yang dimiliki BUMN, BUMD dan kendaraan-kendaraan yang dikomersialkan.

b). Penyerahan kendaraan bermotor kepada perwakilan diplomatik, perwakilan konsuler, perwakilan PBB serta badan-badan, khusus badan atau organisasi Internasional dan tenaga asing yang diperbantukan kepada pemerintah Republik Indonesia, yang sumber dananya berasal dari bantuan hibah.

d. Dasar perhitungan dan tarif BBNKB

1). Untuk menghitung BBNKB adalah nilai jual kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Gubernur dengan berpedoman pada keputusan Mendagri.

2). Besarnya tiap BBNKB atas penyerahan dalam hak milik adalah untuk penyerahan pertama sebesar 10 % dari nilai jual kendaraan bermotor yang sedang berlaku (BBN I). Untuk penyerahan kedua, ketiga dan seterusnya sebesar 5 % dari nilai jual kendaraan kendaraan bermotor yang sedang berlaku (BBN II).

e. Waktu pendaftaran dan pembayaran

Waktu pendaftaran :

1) Orang atau badan, ahli waris yang menerima penyerahan kendaraan bermotor wajib memberitahukan kepada Gubernur dengan mengisi SPT palig lambat : 14 hari setelah tanggal penyerahan kendaraan bermotor dalam hak milik untuk pemilikan baru.

2) 30 hari sejak tanggal fiskal antar daerah bagi kendaran bermotor pidah dari luar daerah.

3) 30 hari sejak penyerahan kendaraan bermotor dalam hak milik, yang menyerahkan kendaraan bermotor wajib lapor kepada Gubernur atas terjadinya penyerahan.

Kewajiban membayar BBNKB yang terhutang :

Pada saat pendaftaran, setelah Nota Pajak/SKP diterbitkan. Selambat-lambatnya pada jatuh tempo pembayaran. Pembayaran

BBNKB dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditentukan oleh Gubernur, sesuai dengan aturan pembayaran yang tercantum dalam Nota pajak, SKP, STB.

f. Denda dan Penagihan

Jika batas waktu pendaftaran tidak dipenuhi maka BBNKB yang terhutang ditambah dengan sanksi administrasi 100% dari pajak yang terhutang. Jika BBNKB tidak dilunasi dalam waktu 30 hari sejak diterbitkan Nota Pajak/ SKP maka dikenakan denda 100% dari BBNKB yang terhutang. Jumlah pajak BBNKB dalam Nota Pajak/SKP dan STP dapat ditagih sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. Keberatan dan Banding

Wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur atas :

Ketetapan pajak, paling lambat 90 hari sejak nota pajak/SKP diterima.

Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran BBNKB yang telah ditetapkan.

h. Ketentuan Pidana

Barang siapa karena kealpaannya, menyampaikan/mengisi STP tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga menimbulkan kerugian pada Pemerintah Daerah, dipidana kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000,00. Disamping ancaman pidana kurungan dan denda, wajib pajak tetap diwajibkan membayar

BBNKB. Kelalaian melaporkan objek pajak (BBNKB) diancam pidana kurungan 3 bulan atau denda Rp 50.000,00.

3. Pajak rumah tangga

   a. Dasar hukum

      Dasar hukum pemungutan pajak rumah tangga adalah ordonansi pajak rumah tangga 1908 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan UU no. 24 prp th. 1959. Pajak ini menurut UU no. 32 tahun 1956 yo peraturan pemerintah no.3 1957 pajak rumah tangga diserahkan pada Pemerintah Daerah Tingkat I.

   b. Subjek pajak rumah tangga adalah dapat berupa orang atau badan.

   c. Objek dan tarif pajak rumah tangga

      1) Nilai sewa rumah kediaman dan bungalow beserta bangunan turutan dan pekarangannya yang besarnya adalah 5% dari harga sewa setahun sedangkan untuk bungalow 20%.

      2) Nilai perabot rumah tangga (alat-alat perlengkapan rumah tangga yang ada di rumah kediaman, bungalow atau pada bangunan turutannya, misal meja dan kursi, almari, kulkas dan lain-lain). Jumlah pajaknya adalah 2% dari nilai perabot rumah.

      3) Sepeda motor : besarnya pajak ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan perkembangan dan tarif masing-masing daerah tidak selalu sama.

4) Mobil : besarnya pajak ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan perkembangan dimana masing-masing daerah tidak selalu sama.

d. Pengecualian pajak rumah tangga

1) Dalam menghitung sewa rumah tidak dihitung bagian-bagian rumah kediaman dan bungalow atau bangunan turutannya yang semata-mata digunakan untuk :

(a) melakukan jabatan atau perusahaan,

(b) keperluan sekolah,

(c) tujuan amal,

(d) badan-badan yang mempunyai manfaat umum,

(e) bangunan kepunyaan pemerintah yang digunakan oleh orang-orang yang karena alasan kesehatan perlu disitu.

2) Dalam menghitung nilai perabot rumah tangga ini ada beberapa barang yang dikecualikan, yaitu :

(a) kuda dan ternak lainnya,

(b) alat atau perkakas untuk melakukan jabatan, pekerjaan perusahaan atau ilmu pengetahuan,

(c) bahan makanan,

(d) pakaian dan perhiasan diri,

(e) buku-buku,

(f) gambar atau lukisan yang tidak dimasukkan sebagai alat rumah tangga atau perhiasan.

5. *Opsen* pajak kekayaan

   a) *Opsen* didasarkan pada SE. Dirjen Pajak no.0.15.4/11./C.1-7/72 tanggal 9 Februari 1972 .

   b) Harus sesuai dengan ketentuan dalam bab III no.11 tahun 1957 (LN no.56) tentang peraturan umum pajak daerah yang telah disahkan menjadi UU no.1/1961 (LN 1961 no.3-TLN no.2124) yang harus ada pengesahan dari presiden.

   c) Besarnya *opsen* 25% dari pajak kekayaan yang terhutang.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Studi Kasus yaitu penelitian terhadap suatu data perusahaan, dari data tersebut kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan. Hasil penelitian ini tidak dapat ditarik sebagai generalisasi sehingga harus disesuaikan dengan kondisi yang berbeda.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi : Penelitian dilakukan di pemerintah daerah tingkat I Propinsi Daerah Instimewa Yogyakarta .

Waktu : Penelitian dilakukan dari bulan Agustus - September 1997.

C. Subjek Penelitian dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

   Yang menjadi subjek penelitian adalah sub dinas pendapatan dan dinas anggaran daerah propinsi daerah istimewa yogyakarta.

2. Objek Penelitian

   Data Pendapatan asli daerah Pemda Tingkat I Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang berasal dari pajak untuk tahun anggran 1992/1993 sampai 1996/1997.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

   Yaitu cara pengumpulan data untuk memperoleh informasi secara langsung dari bagian-bagian yang berwenang atau sumber yang bersangkutan. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung dengan pegawai bagian keuangan yang mengurusi masalah perpajakan dan Kepala Bagian Anggaran .

2. Dokumentasi

   Yaitu cara mengumpulkan data dengan melihat data dari perusahaan yang diteliti. Kegiatan ini dilakukan untuk mendukung pelaksanaan wawancara yang dilakukan.

3. Observasi

   Yaitu teknik pengumpulan data dengan melalui pengamatan langsung terhadap objek dan keadaan yang diteliti serta kagiatan-kegiatan yang dilakukan. Metode ini digunakan untuk memperjelas serta untuk membuktikan kebenaran-kebenaran data yang telah diperoleh melalui metode studi dokumentasi dan wawancara.

E. Teknik Analisis Data

Untuk menjawab permasalahan nomor satu digunakan analisis horisontal yaitu analisis dengan mengadakan perbandingan pendapatan pajak daerah dari tahun anggaran 1992/1993 sampai dengan 1996/1997. Setelah dilakukan

perbandingan maka akan diketahui perkembangan yang terjadi dari Pendapatan Pajak Daerah. Analisis perbandingan ini dapat ditunjukan dalam:

1. Data absolut atau jumlah dalam rupiah.

   Diperoleh dari selisih jumlah rupiah tiap sektor dari tahun anggaran yang diperbandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya.

2. Kenaikan atau penurunan dalam prosentase

   Dihitung dengan membagi jumlah pertambahan atau pengurangan dari Pendapatan Pajak daerah dengan jumlah Pendapatan Pajak Daerah tahun anggaran sebelumnya.

Lebih jelasnya dilakukan dengan menggunakan tabel 3.1.

Tabel 3.1
perbandingan Pendapatan Pajak Daerah
untuk tahun anggaran 1992/1993 atas1996/1997

Sektor Pajak	Tahun Anggaran		Tahun Aggaran		Kenaikan/Penurunan Realisas	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Rp (A)	% (B)
PKB BBNKB						
JUMLAH						

Keterangan:

A = perubahan yang terjadi dalam absolutnya (jumlah dalam rupiah), diperoleh dari selisih antara realisasi pendapatan pajak daerah tahun anggaran yang diperbandingkan dengan realisasi pendapatan pajak daerah tahun anggaran sebelumnya. Misalnya realisasi pendapatan pajak daerah tahun anggaran 1993/1994 dibandingkan dengan tahun anggaran 1992/1993, begitu pula untuk tahun anggaran yang lain sampai tahun anggaran 1996/1997

B = pertambahan atau pengurangan yang ditunjukkan dalam prosentase, dihitung dari hasil yang diperoleh pada huruf A dibagi dengan pendapatan pajak daerah tahun anggaran sebelumnya

Setelah analisis terhadap perkembangan pendapatan pajak daerah diketahui, yaitu apakah mengalami penurunan atau kenaikan, lalu dicari apa yang mempengaruhi dan yang menjadi penyebab kenaikan atau penurunan terhadap pendapatan pajak daerah tersebut.

Untuk menjawab permasalahan nomor dua digunakan teknik peramalan yaitu trend garis lurus. Rumusnya adalah :

$Y = a + bX$, dimana

$$a = \frac{\Sigma Y}{n}$$

$$b = \frac{\Sigma XY}{\Sigma X^2}$$

dengan syarat bahwa $\Sigma X = 0$

Keterangan :

Y = variabel yang diramalkan, dalam hal ini adalah pendapatan pajak daerah.

a = konstanta, yang akan menunjukan besarnya harga Y apabila X=0

b = variabilitas per X yaitu menunjukan besarnya perubahan nilai Y dari setiap perubahan satu unit X

n = jumlah data, yaitu dari tahun anggaran 1992/1993 – 1996/1997

Untuk mempermudah penyelesaian rumus-rumus tersebut maka digunakan tabel 3.3.

Tabel 3.3
Perhitungan Trend
Pendapatan Pajak Daerah

Tahun	Y	X	XY	X^2
1992/1993		-2		4
1993/1994		-1		1
1994/1995		0		0
1995/1996		1		1
1996/1997		2		4
Jumlah		0		10

Setelah diperoleh persamaan Y = a + bX maka dapat dilakukan penghitungan prakiraan pendapatan pajak daerah untuk tahun mendatang. Untuk prakiraan tahun anggaran 1997/1998 maka X=3, untuk tahun anggaran 1998/1999 X=4 dan seterusnya sampai tahun anggaran 2001/2002. Setelah prakiraan pendapatan pajak daerah diketahui maka dapat dibuat penerapan garis trend sebagai berikut :

Grafik 3.1
Prediksi Pendapatan Pajak Daerah
Untuk Tahun Anggaran 1997/1998 sampai 2001/2002

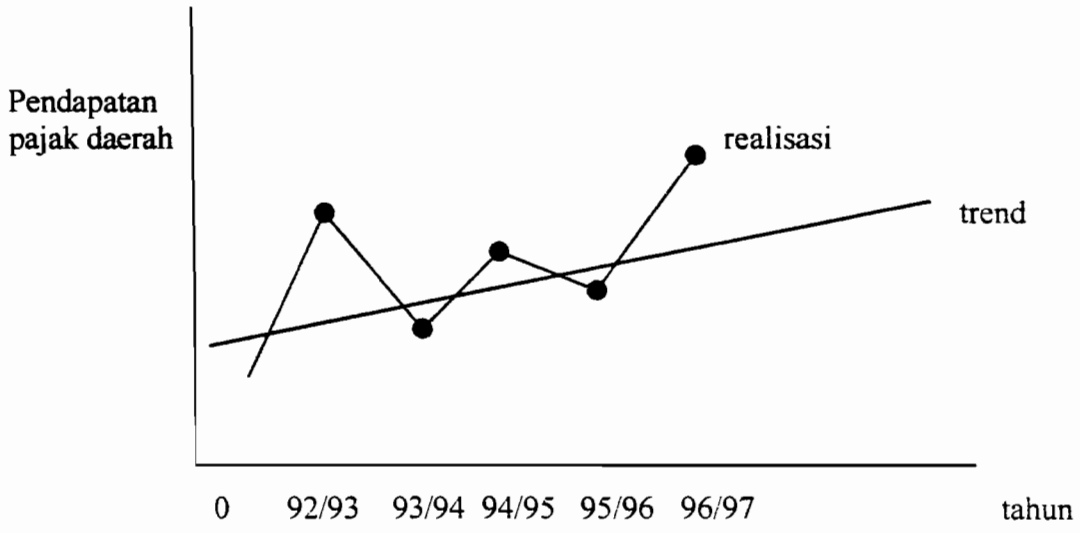

Dari prediksi atau prakiraan yang diperoleh, maka akan diketahui gambaran tentang keadaan masa depan pendapatan pajak daerah yang sekiranya dapat diterima. Dengan demikian pemerintah akan memperoleh masukan untuk menyusun kebijakan yang akan dilakukan.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I PROPINSI DIY

A. Sejarah Pembentukan DIY

Yogyakarta merupakan satu dari dua propinsi di Indonesia yang memiliki status daerah istimewa. Yang lainnya adalah Daerah Istimewa Aceh. Hanya kalau Yogyakarta memperoleh daerah istimewa atas dasar sejarah pada saat terbentuknya Republik Indonesia, sedangkan Aceh baru mendapatkannya pada tahun 1959 karena pertimbangan politik dalam rangka menyelesaikan masalah keamanan.

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta secara resmi terbentuk sejak tanggal 4 Maret 1950, yaitu melalui UU No. 3 Tahun 1950. Akan tetapi kehadiran daerah ini sebagai daerah istimewa sudah ditetapkan dua hari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 agustus 1945, dengan satu piagam penetapan yang ditandatangani Presiden Soekarno, Sultan Hamengku Buwono IX serta Paku Alam VIII pada tanggal 19 Agustus 1945.

Sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Yogyakarta merupakan dua buah kerajaan yang masing - masing dikenal sebagai kesultanan Yogyakarta yang dipimpin oleh Sultan Hamengku Buwono IX dan kadipaten paku alaman dengan rajanya Paku Alam VIII. Namun ketika berita proklamasi diterima di Yogyakarta, kedua pemimpin Yogyakarta tersebut mengadakan pertemuan untuk menentukan sikap yang akan diambil. Setelah

mengadakan konsolidasi dengan lebih kurang 100 orang tokoh pemuda yang terdiri dari berbagai golongan pada tanggal 19 Agustus 1945, Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII pada tanggal 5 September 1945 secara sendiri - sendiri kembali mengeluarkan pernyataan yang pada dasarnya menekankan bahwa kedua kerajaan yang mereka pimpin menjadi bagian dari negara Republik Indonesia yaitu sebagai daerah istimewa. Dalam pernyataan tersebut, kedua pemimpin itu juga menyebutkan bahwa mereka masing - masing tetap menjadi pemegang kekuasaan terhadap daerahnya dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Menyusul pernyataan kedua pemimpin Yogyakarta tersebut sesuai instruksi dari Jakarta, maka pada awal September 1945 terbentuklan Komite Nasional Indonesia (KNI) Daerah Istimewa Yogyakarta. Setelah badan pekerja KNI ini terbentuk pada tanggal 30 Oktober 1945 Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku alam VIII mengeluarkan amanat bersama yang isinya antara lain berbunyi yaitu supaya jalannya pemerintahan di daerah kami berdua selaras dengan dasar - dasar UUD 1945 negara Republik Indonesia, maka badan pekerja ini merupakan suatu badan legeslatif yang dapat dianggap sebagai wakil rakyat daerah kami untuk membikin peraturan dan menentukan haluan jalannya pemerintahan di daerah kami berdua yang sesuai dengan kehendak rakyat.

Dengan Amanat yang menyusul pernyataan sebelumnya itu, maka kedua pemimpin Yogyakarta tersebut telah menyatukan diri dalam sistem negara Republik Indonesia dan juga sekaligus telah mengakhiri dualisme

kepemimpinan. Maka atas dasar sikap tersebut keberadaan kesultanan dan kadipaten paku alaman telah tiada, karena keduanya telah menjadi satu propinsi yaitu Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Geografi

1. Geografi

   Daerah Istimewa yogyakarta adalah salah satu dari 27 propinsi di wilayah Indonesia. Propinsi ini terletak di pulau Jawa bagian tengah sebelah selatan, pada posisi 7°. 33' - 8°.12' lintang selatan dan 110° - 110°.50' bujur timur.

2. Batas Wilayah

   Daerah Istimewa Yogyakarta di bagian selatan dibatasi lautan Indonesia sedangkan di bagian timur laut, barat laut dan bagian barat dibatasi oleh wilayah propinsi Jawa Tengah yang meliputi :

   a. Kabupaten Wonogiri di bagian tenggara
   b. Kabupaten Klaten di bagian timur laut
   c. Kabupaten Magelang di bagian barat laut
   d. Kabupaten Purworejo di bagian barat

3. Luas Wilayah

   Luas wilayah DIY merupakan propinsi terkecil setelah DKI Jakarta yaitu seluas 3.185,80 km^2, dimana secara administratif dibagi dalam 5 daerah tingkat II yang dirinci sebagai berikut :

   a. Kabupaten Kulon Progo seluas 586,27 km^2

b. Kabupaten Bantul seluas 506,85 km^2

c. Kabupaten Gunung Kidul seluas 1.485,36 km^2

d. Kabupaten Sleman seluas 574,82 km^2

e. Kota Madya Yogyakarta seluas 32,50 km^2

C. Penduduk

1. Jumlah penduduk

Jumlah penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 1996 adalah 3.154.265 jiwa, yang diperinci untuk tiap daerah tingkat II yaitu :

a) Kabupaten Kulon Progo 428.630 jiwa

b) Kabupaten Bantul 740.536 jiwa

c) Kabupaten Gunung Kidul 724.685 jiwa

d) Kabupaten Sleman 794.101 jiwa

e) Kotamadya Yogyakarta 466.313 jiwa

2. Komposisi penduduk

Untuk komposisi penduduk dewasa dan anak-anak pada tahun1996 menunjukkan bahwa penduduk dewasa ternyata lebih besar dibandingkan penduduk yang anak-anak, yaitu untuk penduduk dewasa 2.264.997 jiwa sedangkan penduduk yang masih anak-anak 887.541 jiwa. Adapun komposisi penduduk menurut jenis kelamin adalah untuk penduduk wanita 1.598.283 jiwa, sedangkan untuk penduduk laki-laki 1.555.982 jiwa. Rasio perbandingan antara penduduk wanita dengan penduduk laki-laki *(sex ratio)* adalah 97,35.

3. Kepadatan penduduk

Kepadatan penduduk propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 1996 adalah sebesar 990,10 jiwa per km^2. Secara berurutan kepadatan penduduk setiap daerah tingkat II adalah :

a) Kotamadya Yogyakarta sebesar 14.348,09 per km^2.

b) Kabupaten Bantul sebesar 1.461,06 per km^2.

c) Kabupaten Sleman sebesar 1.381,48 per km^2.

d) Kabupaten Kulon Progo sebesar 731,10 per km^2.

e) Kabupaten Gunung Kidul sebesar 487,89 per km^2.

4. Angkatan Kerja

Pertambahan penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun ke tahun sudah tentu akan diikuti pula oleh peningkatan usia kerja dan jumlah angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja dan pencari kerja pada tahun 1996 berdasarkan tingkatan pendidikan adalah sebagai berikut :

a) Untuk tamatan SD sejumlah 4.292 orang.

b) Untuk tamatan SMTP dan yang sederajat sejumlah 9.723 orang

c) Untuk tamatan SMTA dan yang sederajat sejumlah 67.969 orang

d) Untuk lulusan Sarjana dan Sarjana Muda sejumlah 14.011 orang

Sehingga total penduduk angkatan kerja dan pencari kerja di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sejumlah 95.995 orang. Membengkaknya jumlah pencari kerja dari tahun ke tahun masih belum seimbang dengan penyediaan lapangan kerja. Pemerintah melalui Instansi

terkait telah menempuh berbagai langkah untuk menekan jumlah pengangguran.

D. Kekayaan Alam

Potensi sumber daya alam yang dimiliki propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta relatif terbatas baik tanah, air maupun kandungan mineral yang tersimpan di dalam perut bumi. Kendati demikian beranjak dari potensi alam yang terbatas itu Daerah Istimewa Yogyakarta telah mampu mengembangkan sektor-sektor ekonomi lainnya untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang terus meningkat. Kekayaan alam tersebut diantaranya adalah :

1. Tanah

   Jenis tanah yang terdapat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah jenis tanah *alluvial*, *litosol*, *regosol*, *rensina*, *grumosol*, *meditran* dan *latosol*. Untuk penggunaan dan pemanfaatan tanahnya yaitu untuk lahan pertanian, perikanan, peternakan, pekarangan/pembangunan dan lain-lain. Selain lahan yang dimanfaatkan masih terdapat 37.053,22 ha yang merupakan kawasan hutan negara. Untuk penguasaan tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta dikategorikan menjadi dua yaitu tanah yang dikuasai oleh masyarakat dan tanah yang dikuasai oleh negara. Tanah yang dikuasai oleh masyarakat adalah tanah yang telah diwarisi secara turun-temurun, yang pada umumnya telah dimanfaatkan untuk lahan

pemukiman, pertanian dan perkebunan. Sedangkan tanah yang dikuasai oleh negara adalah tanah kawasan hutan yang terdiri dari hutan produksi, hutan lindung, hutan konversi dan tanah-tanah kepentingan umum seperti tanah untuk saluran irigasi, jalan, lapangan olah raga, kuburan dan lain-lain.

2. Air

Kondisi sumber daya air di Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi air hujan, air permukaan dan air tanah. Air permukaan dimanfaatkan untuk pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan dan keperluan domestik. Sedangkan air tanah dimanfaatkan untuk rumah tangga, perkantoran, perhotelan, industri berat dan sebagainya.

Menurut penelitian cadangan air permukaaan (air sungai dan mata air) volumenya mencapai 2.333.576,696 m^3 dan telah dimanfaatkan sebesar 1.645.033,407 m^3. Dan untuk cadangan air tanah yang terdiri dari cadangan air tanah bebas adalah 320.000.000 m^3 dan telah dimanfaatkan 96.533,623 m^3

3. Flora dan Fauna

Jenis-jenis tumbuhannya adalah padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang kedelai, kelapa, kapuk, salak pondoh, dan sebagainya. Di kawasan hutan ditemukan jenis kayu dadap, rotan, sawo kecik, kemiri, jati, pinus dan sebagainya.

Demikian pula jenis binatangnya, meliputi jenis hewan yang diternakkan seperti sapi, kerbau, domba, ternak unggas dan binatang (satwa) yang hidup di kawasan hutan seperti kera, kucing hutan dan berbagai jenis burung.

4. Bahan tambang

Bahan tambang yang terdapat di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta umumnya termasuk bahan galian golongan C, yang terdiri dari batu kapur, kalsit, kaolin, abu bumi/lempung sirap, gips, tias, batu apung, pasir kuarsa, batuan beku andesit, tanah liat, pasir, dan kerikil.

E. Nilai-Nilai Budaya

Yogyakarta terkenal akan masakan khasnya, yakni gudeg. Selain itu Yogyakarta juga terkenal sebagai kota Revolusi dan kebudayaan yang mempunyai pengaruh besar terhadap daerah di sekelilingnya. Kebudayaan-kebudayaan tersebut adalah :

1. Kesenian

Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pusat kebudayaan Jawa banyak menghasilkan berbagai bentuk kesenian yang memberikan ciri kekhasannya, terutama tercermin dalam bidang seni tari, karawitan klasik, wayang dan ketoprak. Beberapa bentuk seni tari diantaranya yaitu Tari Bedoyo, Tari Golek, Tari Serimpi, dan sebagainya.

2. Pakaian Adat

Dalam hal berpakaian adat masyarakat Yogyakarta membedakan antara untuk kaum pria dan wanita. Pakaian adat kaum pria terdiri atas tutup kepala, baju jas dengan leher tertutup dan keris yang diselipkan di pinggang. Ia juga mengenakan kain batik yang mempunyai motif yang sama dengan yang dipakai wanita. Sedangkan pakaian wanitanya terdiri atas kebaya dan kain batik dengan rambut yang disanggul dan diberi hiasan konde.

3. Senjata

Senjata tradisional Daerah Istimewa Yogyakarta berbentuk keris dan tombak. Selain itu juga dikenal adanya tosan aji yang mana tosan berarti besi dan aji berarti dihormati karena bertuah. Sehingga tosan aji berarti senjata yang dihormati karena bertuah.

4. Bangunan

Jenis bangunan tempat tinggal di Daerah Istimewa Yogyakarta dikenal dalam empat macam bentuk yang dibedakan berdasarkan bentuk atapnya, yaitu :

a) Penggape yang mempunyai atap satu sisi.

b) Kampung yang mempunyai atap dua sisi.

c) Limasan yang mempunyai atap empat sisi.

d) Joglo yang mempunyai atap empat sisi seperti limasan, hanya bubungannya lebih tinggi.

F. Ekonomi

Pertumbuhan dan perkembangan sektor-sektor ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta cenderung mengikuti skenario nasional, yaitu menuju keseimbangan antara industri dengan pertanian sambil mendorong pertumbuhan sektor lain. Semakin berperannya sektor industri dalam menggerakkan perekonomian daerah dan menciptakan lapangan kerja baru serta pertumbuhan pesat sektor jasa seperti pariwisata dan transportasi menjanjikan peluang perkembangan serentak sejumlah besar sektor ekonomi. Sektor-sektor ekonomi yang ada yaitu :

1. Sektor Pertanian

   Pertanian merupakan sumber mata pencaharian utama sebagian besar penduduk dan sekaligus sebagai penampung mayoritas angkatan kerja di daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah ini dengan luas 3.185,80 km^2 atau 318.580 ha mempunyai areal pertanian seluas 253.387,8 ha. Sektor-sektor pertanian yang dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi pertanian, tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan.

2. Industri

   Di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat kurang lebih 162 perusahaan. Dari keseluruhan perusahaan industri tersebut yang terbanyak adalah kelompok perusahaan tekstil. Industri-industri tersebut adalah :

a) Industri tekstil pakaian dan kulit sebanyak 50 perusahaan

b) Industri makanan, minuman dan tembakau sebanyak 29 perusahaan

c) Industri kertas, percetakan dan penerbitan sebanyak 17 perusahaan

d) Industri barang galian bukan logam sebanyak 17 perusahaan

e) Industri kayu dan barang-barang dari kayu sebanyak 16 perusahaan

f) Industri barang dari logam, mesin dan perlengkapannya sebanyak 15 perusahaan

g) Industri kimia dan barang-barang dari kimia sebanyak 11 perusahaan.

h) Industri lain-lain sebanyak 7 perusahaan.

3. Pertambangan dan bahan galian

Sampai saat ini telah terdaftar 16.500 unit usaha sektor pertambangan dan bahan galian di Yogyakarta, baik yang dikelola oleh pemerintah setempat maupun oleh swasta dan masyarakat. Misalnya di Gunung Kidul terdapat deposit tambang kaolin sekitar 750.000 ton. Sumbangan sektor ini terdapat penyerapan tenaga kerja yaitu sekitar 25.000 orang. Sedangkan hasil retribusi dari sektor ini yang masuk sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar kurang lebih Rp 600.000.000,- setiap tahun. Komoditi utama bahan

pertambangan dan galian adalah abu bumi, pasir kuarsa, kalsit, batu kapur, pasir kerikil dan gips.

4. Perhubungan

Sarana perhubungan utama di propinsi DIY adalah perhubungan darat dan perhubungan udara. Berdasarkan status pengelolaan, jalan di wilayah ini dapat dibedakan atas jalan negara yaitu sepanjang 90,50 km, jalan propinsi 407,620 km, jalan kabupaten 3.210,54 km, jalan kota madya 223,06 km serta jalan desa atau lingkungan 6.871 km. Untuk perhubungan udara yaitu dilayani melalui Bandar Udara Adi Sucipto yang terletak di Kabupaten Sleman. Sedangkan untuk darat yaitu dengan kereta api yang dilayani melalui dua stasiun yaitu stasiun Lempuyangan dan stasiun Tugu, serta sarana dengan menggunakan kendaraan bermotor.

5. Pariwisata

Jumlah objek wisata di Propinsi DIY sebanyak 85 tempat yang tersebar di seluruh Kabupaten dan Kotamadya. Objek wisata itu terdiri dari 64 objek wisata budaya dan 19 objek wisata alam, yang diantaranya yaitu : Candi Prambanan, Keraton Yogyakarta, Pantai Parangtritis dan Baron, Pusat Perbelanjaan Malioboro dan lain-lain.

6. Perdagangan

Sistem pengadaan penyaluran barang-barang kebutuhan pokok masyarakat dan barang yang dikategorikan srategis merupakan prioritas utama kebijaksanaan pembangunan sistem perdagangan di

Daerah Istimewa Yogyakarta. Prioritas utama yang lainnya adalah mengupayakan sebanyak mungkin barang produksi dalam negeri untuk industri dan konsumsi lokal, contohnya yaitu beras, gula, tepung terigu, kedelai, sabun, minyak, pupuk dan seluruh komponen bahan bangunan. Untuk perdagangan luar negeri propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai 42 buah mata dagangan atau komoditi serta 34 negara sasaran ekspor. Komoditi – komoditi tersebut diantaranya adalah tekstil, sarung tangan golf, pakaian jadi, kerajinan kulit, lampu pijar, kerajinan perak, vanili dan mebel kayu.

G. Politik

Di bidang politik, Yogyakarta bukan hanya terkenal karena melahirkan sejumlah tokoh politik nasional yang memainkan peranan sentral dalam keseluruhan rangkaian kehidupan politik di Indonesia, tetapi juga menjadi tempat lahir dan persemaian bagi tumbuhnya organisasi politik dan kemasyarakatan terkemuka, misalnya Muhammadiyah yang merupakan salah satu organisasi yang tetap mampu bertahan hingga sekarang.

Adapun bagian-bagian dari politik adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan dasar politik

   Kebiijakan dasar bidang politik yang berlaku dan diterapkan di Propinsi DIY dewasa ini adalah kebijakan yang mengacu kepada serangkaian perundang-undangan yang berlaku, dimana sistem

Demokrasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai acuan dasar.

2. Pemerintahan

Kedudukan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII, masing-masing sebagai Gubernur Kepala Daerah dan Wakil Gubernur Kepala Daerah. Setelah Sri Sultan Hamengku Buwono IX wafat, maka Gubernur Kepala Daerah dijabat oleh Sri Paku Alam ke VIII, dengan tidak terikat masa jabatan dan ketentuan mengenai pengangkatan yang diatur dalam UU no. 5/1974.

3. Organisasi dan Administrasi

Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk penyelenggaraan pemerintahan adalah sebagai berikut :

1. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pemegang wewenang tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari di daerah, khususnya di bidang eksekutif.
2. Dalam pelaksanaan wewenangnya, gubernur memiliki hubungan secara fungsional dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memiliki wewenang di bidang legislatif, serta dengan Badan Pertimbangan Daerah.
3. Dalam pelaksanaan wewenang tersebut, gubernur memiliki sejumlah staf yang bertanggung jawab menangani bidangnya masing – masing. Yang termasuk dalam staf gubernur adalah

Sekretariat Wilayah Daerah (Sekwilda), Inspektorat Wilayah, Bappeda, BP-7 Daerah, serta BKPMD. Di samping itu, juga terdapat instansi vertikal yang memiliki hubungan koordinatif dengan gubernur dan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari di bawah koordinasi gubernur.

4. Gubernur membawahkan langsung unit-unit pelaksana wilayah, unit pelaksana daerah, dinas-dinas daerah, badan-badan usaha daerah, serta bupati atau walikotamadya.
5. Di samping unsur-unsur tersebut , juga terdapat Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) yang merupakan forum konsultasi dan koordinasi.
6. Gubernur juga dibantu oleh Direktorat Sosial Politik dan Direktorat Pembangunan Desa selaku aparat Departemen Dalam Negeri yang masing-masing memiliki tugas di bidang sosial politik dan pembangunan desa.
7. Kecuali unsur-unsur pelaksanaan wilayah, pelaksana daerah, dinas-dinas daerah, badan-badan usaha milik daerah serta bupati dan walikota, gubernur juga membawahkan langsung pembantu-pembantu yang mengkoordinasikan, mengawasi dan membina penyelenggaraan pemerintah umum dan pembangunan yang dilaksanakan oleh bupati atau walikotamadya. Dalam pelaksanaan organisasi dan administrasi pemerintahan di Wilayah DIY terdapat 4 Kabupaten Daerah Tingkat II dan 1 Kotamadya Daerah

Tingkat II. Seluruhnya membawahi 63 kecamatan dengan 393 desa dan 45 kelurahan. Disamping itu, juga terdapat 14 pembantu bupati atau walikotamadya. Untuk jabatan pembantu gubernur sejauh ini belum perlu diadakan. Adapun kabupaten atau kotamadya yang ada di Daerah DIY adalah sebagai berikut :

a. Kabupaten Bantul dengan ibu kotanya Bantul,
b. Kabupaten Gunung Kidul dengan ibu kotanya Wonosari,
c. Kabupaten Kulon Progo dengan ibu kotanya Wates,
d. Kabupaten Sleman dengan dengan ibu kotanya Sleman,
e. Kotamadya Yogyakarta dengan ibu kotanya Yogyakarta.

BAB V

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat dua jenis pajak daerah, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Adapun dasar hukum yang melandasi pemungutan kedua jenis pajak tersebut adalah sebagai berikut: untuk pajak kendaraan bermotor dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah No.3 tahun 1991 jo Peraturan Daerah No.3 tahun 1994, sedangkan untuk bea balik nama kendaraan bermotor ditetapkan dengan peraturan daerah No. 4 tahun 1991.

Dalam analisis data pendapatan pajak daerah tahun anggaran 1992/1993 sampai 1994/1995 terdiri dua sektor pajak yaitu dari PKB dan BBNKB. Sedangkan untuk tahun anggaran 1995/1996 dan tahun anggaran 1996/1997 pemerintah telah menetapkan Tunggakan Pajak sehingga terdapat tiga sektor pajak yaitu PKB, BBNKB dan Tunggakan Pajak. Yang dimaksud tunggakan yaitu sisa dari pajak tahun lalu yang belum dibayar oleh wajib pajak. Secara jelasnya pembahasan perkembangan dan prediksi pendapatan pajak daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut:

A. Perkembangan Pendapatan Pajak Daerah dari Tahun Anggaran 1992/1993 Sampai Tahun 1996/1997

Data-data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah tentang pendapatan pajak daerah untuk tahun anggaran 1992/1993 sampai 1996/1997 sebagai berikut:

Tabel 5.1
Pendapatan Pajak Daerah
Tahun Anggaran 1992/1993 sampai 1996/1997

Sektor Pajak	Tahun Anggaran				
	1992/1993	1993/1994	1994/1995	1995/1996	1996/1997
PKB	9.518.450.640	11.283.811.185	14.717.125.932	16.791.449.245	19.523.951.800
BBNKB	9.180.650.255	12.341.199.890	19.153.764.838	22.895.746.050	26.968.731.790
Tunggakan				527.096.535	84.493.230
JUMLAH	18.699.100.895	23.625.011.075	33.870.890.770	40.214.291.830	46.577.176.820

Sebelum mengetahui perkembangan pendapatan pajak daerah, berikut ini akan dijelaskan mengenai perbandingan pendapatan pajak daerah terlebih dahulu.

1. Perbandingan pendapatan pajak daerah untuk tahun anggaran 1993/1994 atas 1992/1993.

Untuk mengetahui perbandingan pendapatan pajak daerah tahun anggaran 1993/1994 atas 1992/1993 dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut.

Tabel 5.2
Perbandingan Pendapatan Pajak Daerah
Tahun Anggaran 1993/1994 atas 1992/1993

Sektor	Tahun Anggaran 1992/1993		Tahun Anggaran 1993/1994		Naik/Turun Realisasi	
Pajak	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	(Rp)	%
PKB	8.328.700.800	9.518.450.640	9.681.757.500	11.283.811.185	1.765.360.545	18,5
BBNKB	8.022.750.000	9.180.650.255	11.018.600.000	12.341.199.890	3.160.549.635	34
JUMLAH	16.351.450.000	18.699.100.895	20.700.357.500	23.625.011.075	4.925.910.180	26

Dari tabel 5.2 dapat dilakukan perbandingan sebagai berikut :

a. Perbandingan anggaran dengan realisasi pendapatan pajak daerah pada tahun Anggaran 1992/1993

Anggaran pendapatan pajak daerah yang telah ditetapkan pada tahun anggaran 1992/1993 adalah sebesar Rp 16.351.450.000,00, dalam realisasinya ternyata menjadi sebesar Rp 18.699.100.895,00. Sehingga dari realisasi pendapatan pajak daerah dengan jumlah anggaran yang ditetapkan terjadi selisih lebih atau peningkatan sebesar Rp 2.747.650.895,00. Terjadinya peningkatan tersebut dapat dilihat dari sektor pajak yang ada yaitu pemasukan dari PKB terjadi selisih lebih dalam realisasinya sebesar Rp 1.189.749.840,00, yaitu dari anggaran sebesar Rp 8.328.700.800 menjadi Rp 9.518.450.640 dalam realisasinya. Sedangkan dari BBNKB terjadi selisih lebih Rp 1.157.906.255,00, yaitu dari Rp 8.022.750.000 yang dianggarkan dalam realisasinya menjadi Rp 9.180.650.225.

b. Perbandingan anggaran dengan realisasi pendapatan pajak daerah pada tahun anggaran 1993/1994

Untuk tahun anggaran 1993/1994 dapat dilihat bahwa anggaran pendapatan pajak daerah yang telah ditetapkan sebesar Rp 20.706.357.500,00, sedangkan realisasi dari pendapatan pajak daerah yang terjadi adalah sebesar Rp 23.625.011.075,00, sehingga dalam realisasi pendapatan pajak daerah terjadi kenaikan sebesar Rp 2.918.635.574,00 dari anggaran yang telah ditetapkan. Kenaikan tersebut terjadi dari sektor PKB dan BBNKB. Dari PKB naik sebesar Rp 1.601.253.685,00 yaitu dari Rp 9.681.757.500 yang dianggarkan menjadi Rp 11.283.811.185 dalam realisasinya. Sedangkan dari BBNKB naik sebesar Rp 1.322.599.890,00, yaitu dari anggaran sebesar Rp11.018.600.000 dalam realisasinya menjadi Rp12.341.199.890.

c. Perbandingan realisasi pendapatan pajak daerah tahun anggaran 1992/1993 dengan tahun anggaran 1993/1994

Realisasi pendapatan pajak daerah tahun anggaran 1993/1994 adalah sebesar Rp 23.625.011.075,00, bila dibandingkan dengan realisasi pendapatan pajak daerah tahun anggaran 1992/1993 yaitu sebesar Rp 18.699.100.895,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp 4.925.910.180,00 atau naik sebesar 26%. Kenaikan ini terjadi dari semua sektor pajak yang ada, yaitu dari PKB dan BBNKB. Dari PKB naik sebesar Rp 1.765.360.345,00, yang berasal dari Rp 9.518.450.640,00 yang dianggarkan menjadi sebesar Rp 11.283.811.185,00 dalam realisasinya. Sedangkan dari BBNKB

naik sebesar Rp 3.160.549.635,00, yaitu dari yang dianggarkan sebesar Rp 9.180.650.255,00 dalam realisasinya menjadi sebesar Rp 12.341.199.890,00.

Penyebab kenaikan ini dikarenakan adanya kenaikan jumlah kendaraan bermotor dan jumlah pendaftaran BBNKB. Jumlah kendaraan bermotor naik sebesar 33.915 kendaraan, yaitu dari 234.470 kendaraan pada tahun anggaran 1992/1993 menjadi 268.385 kendaraan pada tahun anggaran 1993/1994. Dari semua jenis kendaraan yang ada, yang mengalami kenaikan paling besar adalah dari jenis kendaraan bermotor yaitu sebesar 30.072 kendaraan dan yang tidak mengalami kenaikan adalah jenis alat berat yang jumlahnya tetap sebesar 60 kendaraan. Sedangkan dari jumlah pendaftaran BBNKB naik sebesar 4.050 pendaftaran, yaitu yang semula 43.550 kendaraan pada tahun anggaran 1992/1993 menjadi 47.600 pada tahun anggaran 1993/1994 (untuk jumlah kendaraan bermotor dan pendaftaran BBNKB lihat tabel A dan tabel B pada lampiran).

2. Perbandingan Pendapatan Pajak Daerah untuk Tahun Anggaran 1994/1995 atas 1993/1994.

Untuk mengetahui perbandingan pendapatan pajak daerah untuk tahun anggaran 1994/1995 atas 1993/1994 dapat dilihat pada tabel 5.3 berikut ini.

Tabel 5.3
Perbandingan Pendapatan Pajak Daerah
Tahun Anggaran 1994/1995 atas 1993/1994

Sektor	Thn.Anggaran '93/'94	Thn.Anggaran '94/'95		Naik/Turun Realisasi	
Pajak	Realisasi	Anggaran	Realisasi	(Rp)	%
PKB	11.283.811.185	12.847.935.500	14.717.125.932	3.433.314.747	30
BBNKB	12.341.199.890	14.576.200.000	19.153.764.838	6.812.564.948	55
JUMLAH	23.625.011.075	27.423.135.500	33.870.890.770	10.245.879.695	43

Dari tabel 5.3 dapat dilakukan perbandingan sebagai berikut :

a. Perbandingan anggaran dengan realisasi pendapatan pajak daerah tahun anggaran 1994/1995.

   Anggaran yang ditetapkan pada tahun anggaran 1994/1995 sebesar Rp 27.423.135.500,00 dan dalam realisasinya menjadi sebesar Rp 33.870.890.770,00 jadi dalam realisasinya ada kenaikan sebesar Rp 6.447.775.270,00. Kenaikan ini terjadi dari semua sektor pajak yang ada yaitu dari PKB dan BBNKB. Dari PKB naik sebesar Rp 1.869.190.432,00 yaitu dari Rp 12.847.935.500,00 yang dianggarkan dalam realisasinya menjadi Rp 14.717.125.932,00. Sedangkan dari BBNKB naik sebesar Rp 4.578.564.838,00 yaitu dari anggaran sebesar Rp 14.576.200.000,00 dalam realisasinya menjadi sebesar Rp 19.153.764.838,00.

b. Perbandingan realisasi pendapatan pajak daerah tahun anggaran 1993/1994 dengan tahun anggaran 1994/1995

   Realisasi pendapatan pajak daerah pada tahun anggaran 1994/1995 sebesar Rp 33.870.890.770,00 bila dibandingkan dengan tahun anggaran 1993/1994 yaitu Rp 23.625.011.075,00 mengalami kenaikan

sebesar Rp 10.245.879.695,00 atau naik sebesar 43%. Kenaikan ini terjadi dari PKB dan BBNKB. Dari PKB naik sebesar Rp 3.433.314.747,00 yaitu dari Rp 11.283.811.185,00 yang dianggarkan dalam realisasinya menjadi Rp 14.717.125.932,00. Sedangkan dari BBNKB naik sebesar Rp 6.812.564.948,00 yaitu dari yang dianggarkan sebesar Rp 12.341.199.890,00 menjadi Rp 19.153.764.838,00 dalam realisasinya.

Penyebab kenaikan yang cukup besar ini dikarenakan adanya peningkatan jumlah PKB dan pendaftaran BBNKB, dan juga karena diberlakukannya tarif progresif bagi pemilik kendaraan yang lebih dari satu dengan nama dan alamat yang sama. Kenaikan jumlah kendaraan bermotor yaitu sebesar 27.940 kendaraan yaitu dari 2.668.385 kendaraan pada tahun anggaran 1993/1994 menjadi 296.325 kendaraan pada tahun anggaran 1994/1995. Dari semua jenis kendaraan yang ada yang tidak mengalami kenaikan adalah jenis alat berat, sedangkan yang mengalami kenaikan jumlah kendaraan terbesar adalah jenis kendaraan sepeda motor yaitu naik sebesar 24.000 kendaraan. Untuk kenaikan jumlah pendaftaran BBNKB sebesar 3.900 pendaftaran yaitu dari 47.600 pendaftaran pada tahun anggaran 1993/1994 menjadi 51.500 pendaftaran pada tahun anggaran 1994/1995. Sedangkan untuk penerapan tarif progresif ini berlaku mulai tahun anggaran 1994/1995, yang berlaku bagi pemilik kendaraan yang memiliki lebih dari satu dengan nama dan alamat yang sama. Tarif tersebut adalah

120 % untuk kendaraan kedua, 140 % untuk kendaraan ketiga, dan 160 % untuk kendaraan keempat, dan seterusnya dari tarif pajak yang berlaku.

3. Perbandingan Pendapatan Pajak Daerah untuk Tahun Anggaran 1995/1996 atas 1994/1995

Perbandingan pendapatan pajak daerah untuk tahun 1995/1996 atas 1994/1995 dapat dilihat pada tabel 5.4 berikut ini :

Tabel 5.4
Perbandingan Pendapatan Pajak Daerah
Tahun Anggaran 1995/1996 atas 1994/1995

Sektor	Th.Anggaran '94/'95	Th.Anggaran '95/'96		Naik/Turun Realisasi	
Pajak	Realisasi	Anggaran	Realisasi	(Rp)	%
PKB	14.717.125.932	14.349.406.305	6.791.449.245	2.074.323.313	14
BBNKB	19.153.764.838	20.751.241.100	2.895.746.050	3.741.981.212	19,5
Tunggakan		542.688.380	527.096.535	527.096.535	
JUMLAH	33.870.890.770	35.643.335.785	0.214.291.830	6.343.401.060	19

Dari tabel 5.4 dapat dilakukan perbandingan sebagai berikut :

a. Perbandingan anggaran dengan realisasi pendapatan pajak daerah pada tahun anggaran 1995/1996

Realisasi pendapatan pajak daerah pada tahun anggaran 1995/1996 untuk PKB dan BBNKB bila dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan mengalami kenaikan. Dari PKB naik sebesar Rp 2.442.042.940,00 yaitu dari Rp 14.349.406.305,00 yang dianggarkan dalam realisasinya menjadi Rp 16.791.449.245,00. Dari BBNKN naik sebesar Rp 2.144.504.950,00 yaitu berasal dari anggaran sebesar Rp 20.751.241.100,00 menjadi Rp 22.895.746.050,00 dalam realisasinya. Sedangkan untuk tunggakan pajak dalam realisasinya

mengalami penurunan sebesar Rp 15.591.845, penurunan tersebut berasal dari Rp 542.699.380,00 yang dianggarkan ternyata realisasinya hanya memperoleh Rp 527.096.535,00. Jadi kenaikan yang terjadi antara realisasi dengan anggaran pendapatan pajak daerah untuk tahun anggaran1995/1996 adalah sebesar Rp 4.570.956.045,00. Kenaikan ini berasal dari Rp 35.643.335.785,00 yang dianggarkan menjadi Rp 40.214.291.830,00 dalam realisasinya.

b. Perbandingan realisasi pendapatan pajak daerah tahun anggaran 1994/1995 dengan tahun anggaran 1995/1996

Realisasi pendapatan pajak daerah untuk anggaran 1995/1996 bila dibandingkan dengan tahun anggaran 1994/1995 mengalami kenaikan sebesar Rp 6.343.401.060,00 atau naik sebesar 19%, yaitu dari sebesar Rp 33.870.890.770,00 pada tahun anggaran 1994/1995 menjadi Rp 40.214.291.830,00. Kenaikan ini berasal dari kenaikan realisasi PKB sebesar Rp 2.074.323.313,00, dari kenaikan realisasi BBNKB sebesar Rp 3.741.981.212,00 dan dari penerimaan tunggakan pajak sebesar Rp 527.096.535,00.

Penyebab kenaikan ini karena :

1) Adanya kenaikan jumlah kendaraan bermotor dan jumlah pendaftaran BBNKB pada tahun anggaran 1995/1996. Kenaikan jumlah kendaraan bermotor sebesar 33.500 kendaraan (selisih 329.825 - 296.325). Dari semua jenis kendaraan yang mengalami kenaikan terbesar adalah jenis kendaraan sepeda motor dan yang tidak mengalami kenaikan adalah

jenis alat berat, dengan jumlah yang tetap sebesar 60 kendaraan. Sedangkan kenaikan jumlah pendaftaran BBNKB sebesar 6.000 (selisih 57.500 - 51.500) pendaftaran (lihat lampiran pada tabel A dan tabel B).

2) Berlakunya pajak progresif untuk pemilik kendaraan yang lebih dari satu dengan nama dan alamat yang sama.

4. Perbandingan Pendapatan Pajak Daerah untuk Tahun Anggaran 1996/1997 atas 1995/1996

Untuk mengetahui perbandingan pendapatan pajak daerah tahun anggaran 1996/1997 atas 1995/1996 dapat dilihat pada tabel 5.5 berikut ini:

Tabel 5.5
Perbandingan Pendapatan Pajak Daerah
Tahun Anggaran 1996/1997 atas 1995/1996

Sektor	Thn.Anggaran '95/'96	Thn.Anggaran '96/'97		Naik/Turun Realisasi	
Pajak	Realisasi	Anggaran	Realisasi	(Rp)	%
PKB	16.791.449.245	17.498.587.460	19.523.951.800	2.732.502.555	16
BBNKB	22.895.746.050	26.158.162.250	26.968.731.790	4.072.967.740	18
Tunggakan	527.096.535	50.000.000	84.493.230	(442.603.305)	-84
JUMLAH	40.214.291.830	43.706.749.710	46.577.176.280	6.362.866.990	16

Dari tabel 5.5 dapat dilakukan perbandingan sebagai berikut :

a. Perbandingan anggaran dengan realisasi pendapatan pajak daerah pada tahun anggaran 1996/1997

Realisasi pendapatan pajak daerah untuk tahun anggaran 1996/1997 sebesar Rp 46.577.176.280,00 bila dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp 43.706.749.710,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 2.870.426.570,00 atau sebesar 16 %. Kenaikan ini

diperoleh dari semua sektor pajak yang ada, yaitu dari PKB naik sebesar Rp 2.025.373.340,00 (Rp 19.523.951.800,00- Rp 17.498.587.460,00) dari BBNKB naik sebesar Rp 810.569.540,00 (Rp 26.968.731.790,00 - Rp 26.158.162.250,00) dan dari tunggakan pajak naik sebesar Rp 34.493.230,00 (Rp 84.493.230,00- Rp 50.000.000,00).

b. Perbandingan realisasi anggaran pendapatan pajak daerah tahun anggaran 1995/1996 dengan tahun anggaran 1996/1997

Untuk realisasi pendapatan pajak daerah tahun anggaran 1996/1997 bila dibandingkan dengan tahun anggaran 1995/1996 dari sektor PKB mengalami kenaikan sebesar Rp 2.732.502.555,00 (Rp 19.523.951.800,00 - Rp 17.498.587.460,00), dari BBNKB naik Rp 4.072.967.740,00 (Rp 26.968.731.790,00 - Rp 22.895.746.050,00), sedangkan dari tunggakan pajak mengalami penurunan yang cukup besar yaitu Rp 442.603.305,00 atau sebesar 84% (Rp 84.493.230.00- Rp527.906.535,00).Jadi untuk realisasi pendapatan pajak daerah tahun anggaran 1996/1997 bila dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 1995/1996 mengalami kenaikan sebesar Rp 6.362.866.990,00 (Rp 46.577.176.280,00 - Rp 40.214.291.830,00).

Penyebab kenaikan ini karena :

1) Kenaikan jumlah kendaraan bermotor dan jumlah pendaftaran BBNKB tahun anggaran 1996/1997. Kenaikan jumlah kendaraan bermotor yaitu sebesar 46.956 kendaraan (selisih 378.781 - 325.825). Dari semua jenis

yang ada, yang mengalami kenaikan terbesar adalah dari sepeda motor sebesar 42.825, sedangkan alat berat tidak mengalami kenaikan/penurunan. Untuk jumlah pendaftaran BBNKB naik sebesar 5.653 pendaftaran (selisih 63.153 – 57.500).

2) Diberlakukannya tarif progresif bagi pemilik kendaraan lebih dari satu dengan nama dan alamat yang sama.

Dari perbandingan perbandingan yang telah dilakukan dari tahun anggaran 1992/1993 sampai tahun 1996/19967 di atas, untuk perbandingan realisasi pendapatan pajak daerah dapat dilihat dan dirangkum dalam tabel 5.6 berikut ini :

Tabel 5.6
Perbandingan Pendapatan Pajak Daerah
Tahun Anggaran 1992/1993 sampai 1996/1997

Tahun Anggaran	Kenaikan/Penurunan Realisasi	
	Rp	Prosen
1993/1994 atas 1992/1993	4.925.910.180	26
1994/1995 atas 1993/1994	10.245.879.695	43
1995/1996 atas 1994/1995	6.343.401.060	18
1996/1997 atas 1995/1996	6.362.866.990	16

Dari Tabel 5.6 di atas dapat diketahui bahwa pendapatan pajak daerah dari tahun anggaran 1992/1993 sampai 1996/1997 selalu mengalami perkembangan atau kenaikan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui Grafik 5.1. berikut ini:

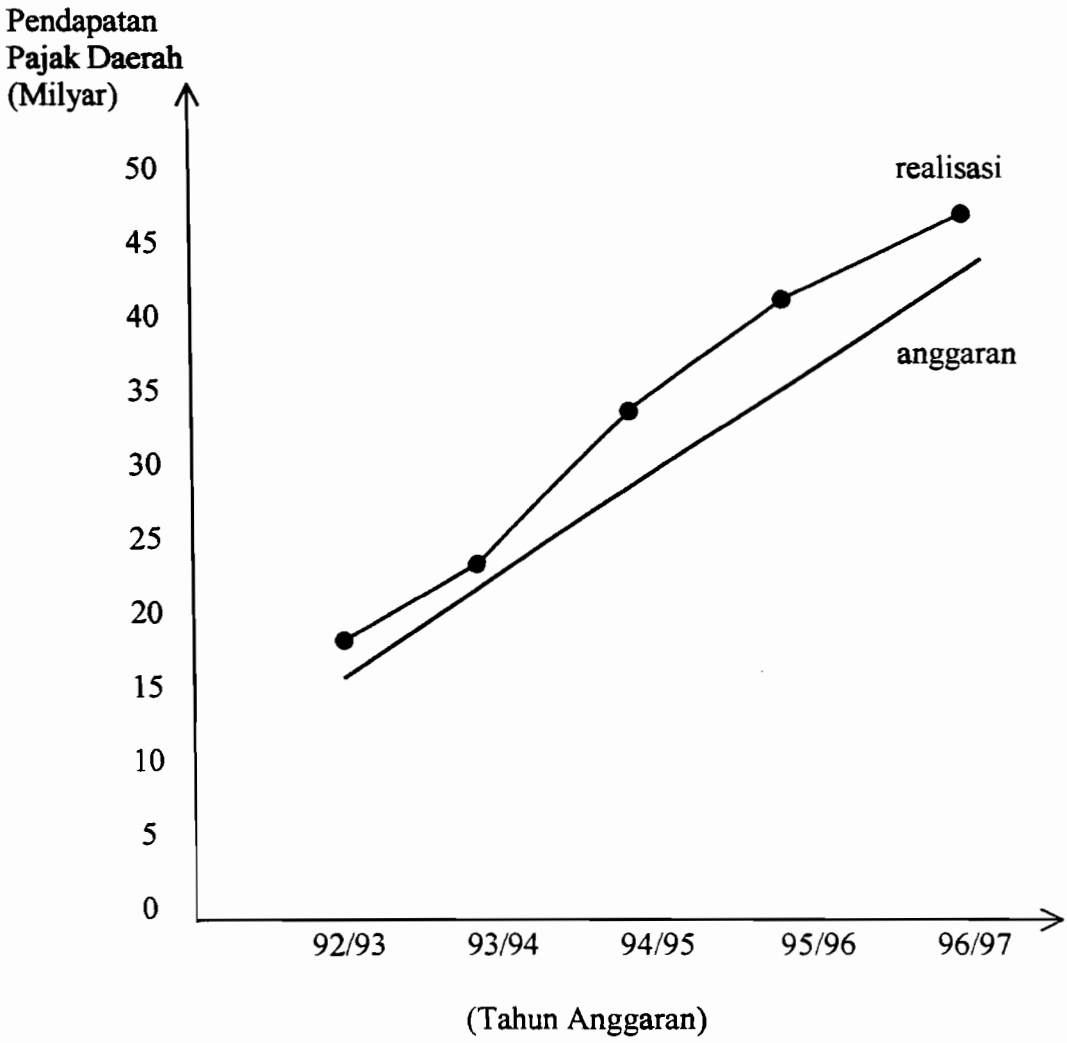

Grafik 5.1 Anggaran Pendapatan Pajak Daerah dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan pajak daerah dari tahun anggaran 1992/1993 sampai tahun anggaran 1996/1997 selalu mengalami kenaikan dan juga melebihi anggaran yang telah ditetapkan. Kenaikan pendapatan pajak daerah tersebut disebabkan oleh hal-hal berikut ini :

1. Adanya kenaikan jumlah kendaraan bermotor dan pendaftaran BBNKB. (jumlah kendaraan dan pendaftaran BBNKB lihat pada lampiran).
2. Penerapan tarif pajak progresif bagi pemilik kendaraan yang memiliki lebih dari satu dengan nama dan alamat yang sama, yang mulai berlaku sejak tahun anggaran 1994/1995.

Selain itu juga ada hal-hal yang mendorong pendapatan pajak daerah supaya meningkat, diantaranya adalah:

1. Adanya razia terpadu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), yang berhak memeriksa dan melaporkan hanya PPNS yang sudah bersertifikat. Razia ini bertujuan untuk mengetahui kelengkapan-kelengkapan yang berhubungan dengan kendaraan yang dimiliki Pegawai Negeri seperti Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Dengan adanya operasi ini maka mendorong Pegawai Negeri untuk melengkapi kelengkapan yang diperlukan bagi kendaraannya.
2. Adanya razia terpadu yaitu kerjasama polisi dengan DLLAJR, yang bertujuan untuk memeriksa kelengkapan kendaraan bagi semua pemakai kendaraan di jalan raya seperti SIM dan STNK. Dengan adanya operasi ini maka mendorong masyarakat yang memiliki kendaraan untuk melengkapi kelengkapan yang diperlukan bagi kendaraannya.
3. Komputerisasi yang telah dilakukan di seluruh kantor Samsat Yogyakarta. Dengan adanya komputerisasi ini maka pelayanan kepada masyarakat dan wajib pajak dapat lebih cepat dan lebih lancar.

4. Penyuluhan kepada masyarakat dan wajib pajak tentang pentingnya pajak dan membayar pajak. Diantaranya dengan melakukan penyuluhan langsung kepada masyarakat dan menyediakan brosur-brosur tentang PKB dan BBNKB

B. Prediksi Pendapatan Pajak Daerah untuk Tahun Anggaran 1997/1998 sampai Tahun Anggaran 2001/2002

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa antara anggaran pendapatan pajak daerah yang telah ditetapkan dengan realisasi yang diperoleh antara tahun anggaran 1992/1993 sampai tahun 1996/1997 selalu mengalami ketidaktepatan. Ketidaktepatan ini dapat dilihat dari hasil realisasi pendapatan pajak daerah yang selalu lebih besar/naik dari anggaran yang telah ditetapkan (lihat pembahasan pada masalah 1), dengan kenaikan rata-rata sebesar 13,52 % (lihat pada lampiran realisasi pendapatan). Dengan anggaran yang terlalu kecil, maka akan mempengaruhi alokasi pembelanjaan/pendanaan yang akan dilakukan juga terlalu kecil, sehingga dalam realisasi pengeluaran yang dilakukan dapat berubah. Alokasi pendanaan yang dilakukan yaitu untuk Belanja Rutin non pegawai yang terdiri dari belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja lain-lain serta subsidi dan sumbangan untuk daerah tingkat II. Alokasi pendanaan yang terlalu kecil, maka tabungan pemerintah (pendapatan asli daerah dikurangi belanja rutin non pegawai) untuk pembangunan juga terlalu kecil, sehingga pembangunan yang seharusnya dapat dilakukan untuk tahun ini, tertunda untuk tahun yang akan datang. Dalam

lampiran yaitu pada realisasi belanja rutin dapat dilihat, bahwa pembelanjaan rutin yang dilakukan dari tahun anggaran 1991/1992 sampai tahun anggaran 1995/1996 dalam realisasinya mengalami kenaikan sebesar 17,88 %. Bila dilihat dari penentuan anggaran yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah, ternyata dasar penentuannya tidak berdasarkan dari realisasi pendapatan yang telah diterima, tetapi hanya berdasarkan Kebijakan Gubernur, yaitu 10 % lebih besar dari anggaran tahun lalu. Dalam lampiran pada proyeksi pendapatan dapat dilihat bahwa pemerintah daerah telah membuat prediksi pendapatan yang akan diterima dari tahun anggaran 1997/1998 sampai tahun anggaran 2001/2002 dengan perhitungan kenaikan rata-rata diperkirakan 10 %. Dengan melihat prediksi yang telah dibuat oleh pemerintah, maka penulis mencoba untuk memberi alternatif lain dalam penentuan prediksi atau prakiraan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya dalam pendapatan pajak daerah yang merupakan penerimaan terbesar dalam PAD. Untuk prediksi/prakiraan pendapatan pajak daerah ini dibagi menjadi dua sektor prediksi, yaitu prediksi untuk PKB dan prediksi BBNKB. Untuk mencari prediksi digunakan metode garis lurus dengan persamaan Y=a+bX. Untuk lebih jelasnya, prediksi-prediksi tersebut adalah :

1. **Prediksi Pendapatan Pajak Daerah dari Pajak Kendaraan Bermotor untuk Tahun Anggaran 1997/1998 sampai Tahun 2001/2002**

   Untuk mencari nilai dari persamaan Y = a + bX dipergunakan Tabel 5.7 berikut ini :

Tabel 5.7
Perhitungan Trend Pendapatan
Pajak Kendaraan Bermotor

Tahun Anggaran	X	Y	XY	X^2
1992/1993	-2	9.518.450.640	- 19.036.901.280	4
1993/1994	-1	11.283.811.185	- 11.283.811.185	1
1994/1995	0	14.717.125.932	0	0
1995/1996	1	16.781.449.245	16.781.449.245	1
1996/1997	2	19.523.951.800	39.047.903.600	4
JUMLAH	0	71.824.788.802	25.508.640.380	10

Dari tabel tersebut kemudian dicari persamaan Y = a + bX

$$\text{Untuk } a = \frac{\Sigma Y}{N}$$

$$= \frac{71.824.788.802}{5}$$

$$= 14.364.597.760$$

$$\text{Untuk } b = \frac{\Sigma XY}{\Sigma X^2}$$

$$= \frac{25.508.640.380}{10}$$

$$= 2.550.864.038$$

Setelah nilai a dan b diketahui kemudian dibuat persamaan sebagai berikut yaitu: Y = 14.364.957.760 + 2.550.864.038(X). Kemudian dari persamaan tersebut dibuat prediksi pendapatan pajak kendaraan bermotor untuk tahun anggaran 1997/1998 sampai tahun 2001/2002 sebagai berikut:

Tahun 1997/1998, Y = 14.346.957.760 + 2.550.864.038(3)

= 22.017.549.874

Tahun 1998/1999, Y = 14.346.957.760 + 2.550.864.038(4)

= 24.568.413.912

Tahun 1999/2000, Y = 14.346.957.760 + 2.550.864.038(5)

= 27.119.277.950

Tahun 2000/2001, Y = 14.346.957.760 + 2.550.864.038(6)

= 29.670.141.988

Tahun 2001/2002, Y = 14.346.957.760 + 2.550.864.038(7)

= 32.221.006.026

Setelah prediksi pendapatan PKB untuk tahun anggaran 1997/1998 sampai 2001/2002 diketahui, kemudian dibuat penerapan garis trend yang ditunjukkan pada grafik 5.2.

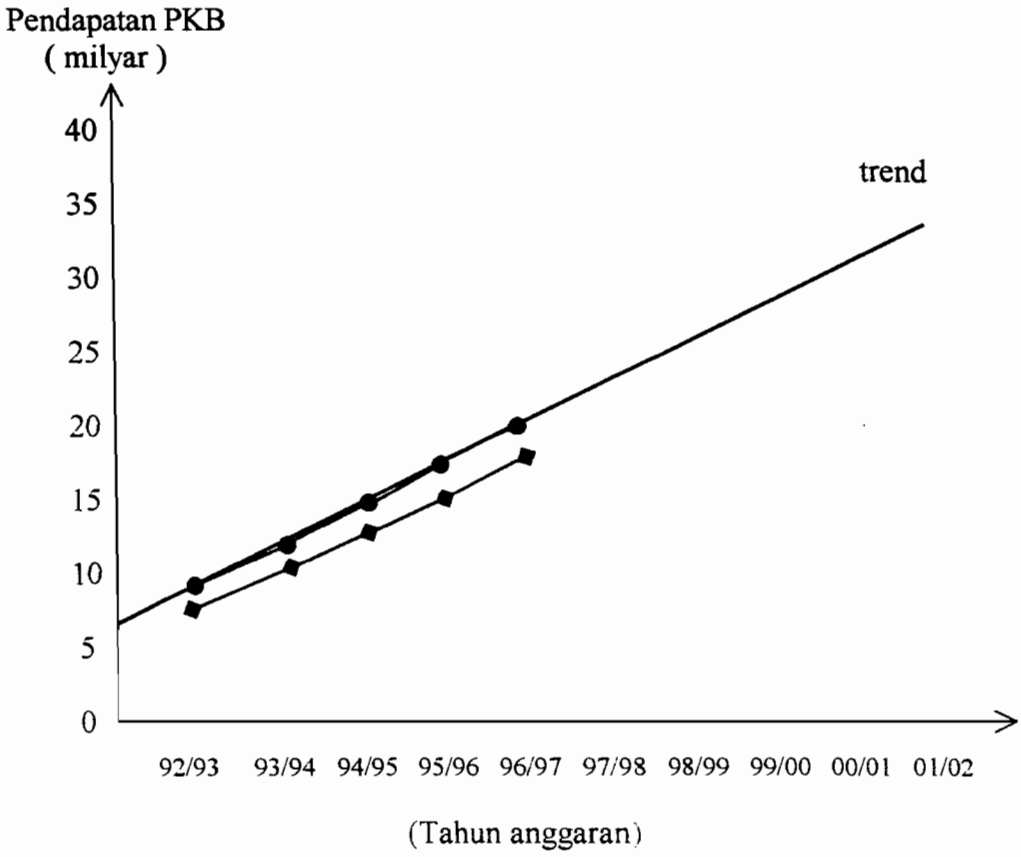

Grafik 5.2 Prediksi Pendapatan PKB

Keterangan :

- ● Realisasi pendapatan pajak kendaraan bermotor tahun anggaran 1992/1993 sampai 1996/1997.
- —— Prediksi pendapatan pajak kendaraan bermotor tahun anggaran 1997/1998 sampai 2001/2002.
- ♦ Anggaran pendapatan pajak kendaraan bermotor tahun anggaran 1992/1993 sampai 1996/1997

2. Prediksi Pendapatan Pajak Daerah dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk Tahun Anggaran 1997/1998 sampai 2001/2002

Untuk membuat persamaan Y = a + bX dipergunakan tabel 5.8 sebagai berikut :

Tabel 5.8
Perhitungan Trend
Bea Balik Nama Kendaraan

Tahun Anggaran	X	Y	XY	X^2
1992/1993	-2	9.180.650.255	- 18.361.260.510	4
1993/1994	-1	12.341.199.890	- 12.341.199.890	1
1994/1995	0	19.153.764.838	0	0
1995/1996	1	22.895.746.050	22.895.746.050	1
1996/1997	2	26.968.731.790	53.937.463.580	4
JUMLAH	0	90.540.092.823	46.130.749.230	10

Dari tabel tersebut kemudian dicari nilai dari persamaan Y = a + bX yaitu:

$$\text{Untuk } a = \frac{\Sigma Y}{N}$$

$$= \frac{90.540.092.823}{5}$$

$$= 18.108.018.565$$

$$\text{Untuk } b = \frac{46.130.749.230}{10}$$

$$= 4.613.074.923$$

Setelah nilai a dan b diperoleh, kemudian disusun persamaan sebagai berikut : Y = 18.108.018.565 + 4.613.074.923 X. Dari persamaan tersebut kemudian dibuat prediksi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk tahun anggaran 1997/1998 sampai tahun 2001/2002, yaitu sebagai berikut:

Tahun 1997/1998, Y = 18.108.018.565 + 4.613.074.923(3)

= 31.947.243.334

Tahun 1998/1999, Y = 18.108.018.565 + 4.613.074.923(4)

= 36.560.318.257

Tahun 1999/2000, Y = 18.108.018.565 + 4.613.074.923(5)

= 41.173.393.180

Tahun 2000/2001, Y = 18.108.018.565 + 4.613.074.923(6)

= 45.786.468.102

Tahun 2001/2002, Y = 18.108.018.565 + 4.613.074.923(7)

= 50.399.543.025

Setelah prediksi pendapatan BBNKB untuk tahun anggaran 1997/1998 sampai 2001/2002 diketahui, kemudian dibuat garis penerapan dalam trend yang ditunjukan dengan grafik 5.3 sebagai berikut :

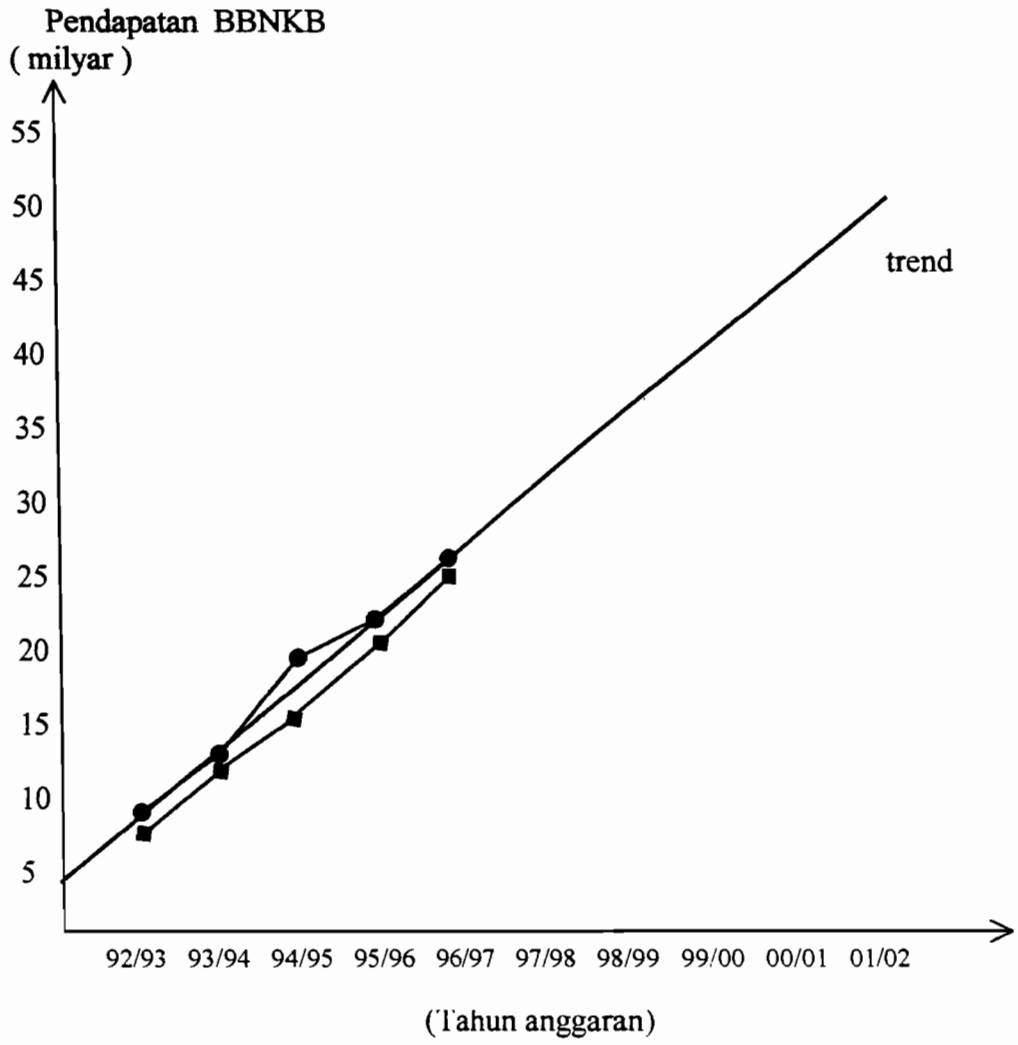

Grafik 5.3 Prediksi Pendapatan BBNKB

Keterangan :

- ● Realisasi pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor tahun anggaran 1992/1993 sampai 1996/1997.

—— Prediksi pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor tahun anggaran 1997/1998 sampai 2001/2002.

- ♦ Anggaran pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor tahun anggaran 1992/1993 sampai 1996/1997.

Dari perhitungan prediksi PKB dan prediksi BBNKB yang telah dilakukan maka diperoleh prediksi pendapatan pajak daerah untuk tahun anggaran

1997/1998 sampai 2001/2002, dengan cara Prediksi PKB ditambah prediksi BBNKB untuk tahun anggaran yang sama. Prediksi pendapatan pajak daerah secara berturut-turut sebagai berikut :

Tahun anggaran 1997/1998 = Rp 22.017.549.874,00 + Rp 31.947.243.334,00

= Rp 53.964.793.208,00

Tahun anggaran 1998/1999 = Rp 24.568.413.912,00 + Rp 36.560.318.257,00

= Rp 61.128.732.169,00

Tahun anggaran 1999/2000 = Rp 27.119.277.950,00 + Rp 41.173.393.183,00

= Rp 68.292.671.133,00

Tahun anggaran 2000/2001 = Rp 29.670.140.988,00 + Rp 45.786.468.102,00

= Rp 75.456.609.090,00

Tahun anggaran 2001/2002 = Rp 32.221.006.026,00 + Rp 50.399.543.025,00

= Rp 82.620.549.051,00

Setelah prediksi pendapatan pajak daerah untuk tahun anggaran 1997/1998 diketahui kemudian dibuat penerapan dalam garis trend sebagai berikut :

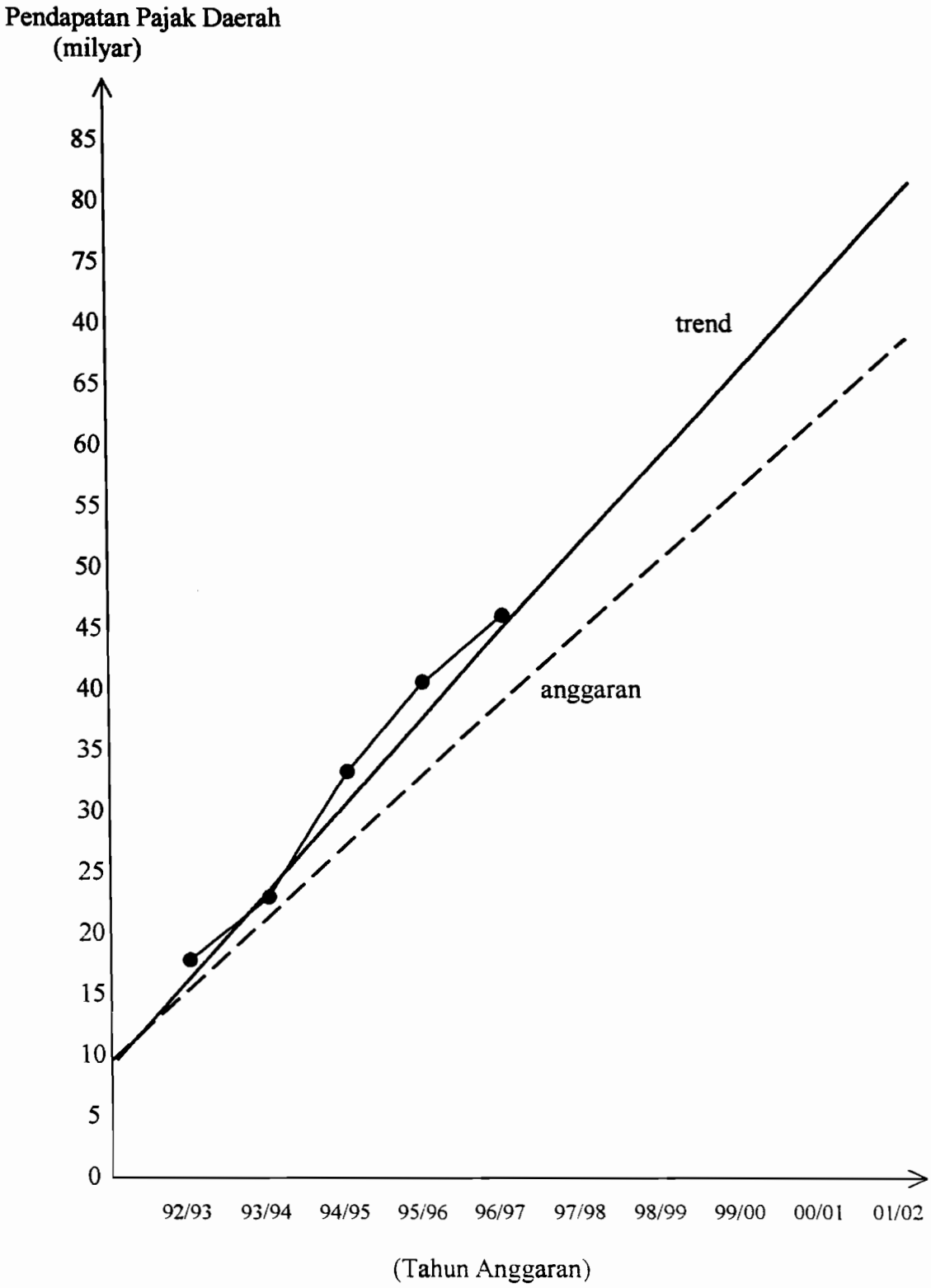

Grafik 5.4 Prediksi Pendapatan Pajak Daerah

Keterangan : • Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 1992/1992 sampai 1996/1997.

—— Prediksi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 1997/1998 sampai 2001/2002.

- - - Prediksi/Proyeksi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 1997/1998 sampai 2001/2002 dari Pemerintah. (lihat pada lampiran proyeksi pendapatan)

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkembangan Pendapatan Pajak propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun anggaran 1992/1993 sampai tahun anggaran 1996/1997 selalu mengalami peningkatan atau kenaikan. Peningkatan ini dapat dilihat dari penerimaan pendapatan pajak daerah dari tahun ke tahun yang selalu naik, bahkan melebihi dari anggaran yang telah ditetapkan. Penyebab kenaikan ini, karena jumlah kendaraan bermotor dan jumlah pendaftaran BBNKB yang ada di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Dari semua jenis kendaraan yang ada, yang selalu mengalami kenaikan jumlah kendaraan terbesar adalah jenis kendaraan sepeda motor. Sedangkan yang tidak pernah mengalami kenaikan adalah jenis alat berat yang jumlahnya selalu tetap sebanyak 60 kendaraan. Penyebab lain dari kenaikan ini adalah karena diberlakukannya tarif progresif bagi pemilik kendaraan yang lebih dari satu dengan nama dan alamat yang sama.
2. Dari perhitungan yang telah dilakukan, ternyata prediksi pendapatan pajak daerah untuk tahun-tahun mendatang mengalami kecenderungan naik. Prediksi-prediksi tersebut sebagai berikut :

a Tahun anggaran 1997/1998 sebesar Rp 53.964.793.208,00

b Tahun anggaran 1998/1999 sebesar Rp 61.128.732.169,00

c Tahun anggaran 1999/2000 sebesar Rp 68.292.671.133,00

d Tahun anggaran 2000/2001 sebesar Rp 75.456.609.090,00

e Tahun anggaran 2001/2002 sebesar Rp 82.620.549.051,00

B. KETERBATASAN PENELITIAN

Dalam penelitian, ada sebagian data yang diperlukan oleh penulis, tidak ada di Dinas Pendapatan Daerah. Data tersebut adalah jumlah dalam rupiah dari tiap-tiap jenis kendaraan bermotor dan pendaftaran BBNKB yang ada di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun anggaran 1992/1993 sampai tahun anggaran 1996/1997. Dinas Pendapatan Daerah memperoleh pendapatan pajak dari tiap Daerah Tingkat II atau Samsat tidak terperinci dalam tiap jenis kendaraan bermotor dan pendaftaran BBNKB, tetapi langsung secara umum untuk PKB dan BBNKB.

C. SARAN

Setelah melakukan penelitian Di Dinas Pendapatan Daerah di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, penulis akan memberikan saran dan masukan yang sekiranya nanti dapat berguna untuk perkembangan pendapatan pajak daerah. Saran-saran yang dapat penulis berikan antara lain :

1. Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan usaha peningkatan pendapatan asli daerah melalui PKB dan BBNKB, aparat Dinas

Pendapatan Daerah dituntut untuk dapat mengembangkan administrasi dan operasional secara profesional dan optimal dengan memperhatikan faktor-faktor kecepatan pelayanan, keamanan, kemudahan, serta kepuasan wajib pajak.

2. Mengingat masyarakat sebagai wajib pajak cukup penting peranannya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak, maka kegiatan penyuluhan pajak daerah kepada masyarakat perlu ditingkatkan secara rutin, meluas, dan merata. Penyuluhan-penyuluhan tersebut dapat dilakukan melalui surat kabar, papan pengumuman, radio, maupun media televisi.
3. Pemerintah Daerah dalam memprediksikan pendapatan daerah untuk tahun-tahun yang akan datang jangan hanya berdasarkan Kebijakan Gubernur yang sudah berlaku saja, tetapi hendaknya juga berdasarkan potensi yang dimiliki oleh pemerintah daerah sendiri, sehingga dalam penyusunan anggarannya, akan tercapai ketepatan.

DAFTAR PUSTAKA

Ahyari, Agus. (1996). *Anggaran Perusahaan.* Yogyakarta : BPFE

Aini, Hamdani.H. (1991). *Perpajakan.* Jakarta : Bumi Aksara.

Azhari, A. Samudra, Msi. (1995). *Perpajakan.* Jakarta.: PT. Gramedia Pustaka Tama.

Baswir, Revrisond. (1995). *Akuntansi Pemerintahan Indonesia.* Yogyakarta: BPFE.

Daerah Istimewa Yoyakarta Dalam Angka 1996 : Kantor statistik (BPS) Propinsi DIY.

Devas, Nick. (1989). *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia.* Jakarta : UI-Press..

Mardiasmo, MA, Ak. (1992). *Perpajakan edisi ke 3.* Yogyakarta: Andi Offset.

Munawir,s, Akt. (1996). *Analisa Laporan Keuangan.* Yogyakarta : Liberty

Nurdjaman, Arsjad. (1991). *Keuangan Negara.* Jakarta : Intermedia

Tunggal, AminWidjaja, Ak, MBA. (1995). *Tanya Jawab Perpajakan Indonesia.* Jakarta: Havaraindo.

Undang-Undang RI tahun 1994 tentang Perpajakan. Jakarta : Mitra Info.

Zandjani, Amachi Chairul Tubagus. (1992). *Perpajakan.*Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

LAMPIRAN

Tabel Lampiran A
Jumlah Kendaraan Bermotor Propinsi DIY
Tahun Anggaran 1992/1993 sampai 1996/1997

Jenis kendaraan	Tahun Anggaran				
	1992/1993	1993/1994	1994/1995	1995/1996	1996/1997
Sedan	9.782	10.670	11.531	12.461	12.580
Jeep	3.684	4.191	4.558	4.926	5.676
Bus/Mikrobus	19.204	20.812	22.493	24.307	27.146
Truk/Pick up	15.342	16.182	17.213	18.601	20.754
Sepeda motor	186.398	216.470	240.470	269.470	312.565
Alat Berat	60	60	60	60	60
JUMLAH	234.470	268.385	296.325	329.825	378.781

Tabel Lampiran B
Jumlah Pendaftaran pada BBNKB
Tahun Anggaran 1992/1993 sampai 1996/1997

Jenis Pendaftaran	Tahun Anggaran				
	1992/1993	1993/1994	1994/1995	1995/1996	1996/1997
BBN I	14.850	16.600	22.000	26.500	37.661
BBN II	28.700	31.000	29.500	31.000	25.492
JUMLAH	43.550	47.600	51.500	57.500	63.153

Keterangan :

BBN I = Bea Balik Nama Kendaraan untuk kendaraan baru dengan tarif 10 %.

BBN II = Bea Balik Nama Kendaraan dari hasil pindah hak milik, bisa melalui perantara atau secara langsung dengan tarif 5 %.

A. REALISASI PENDAPATAN.

Dalam Ribuan Rupiah.

No.	JENIS PENERIMAAN	1991/1992	1992/1993	1993/1994	1994/1995	1995/1996
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Yang Lalu	7.099.127,00	5.711.926,00	6.553.532,00	7.036.980,00	10.974.519,00
2	Pajak Daerah	15.927.580,00	18.699.101,00	20.700.357,00	33.870.891,00	40.229.883,00
3.	Retribusi Daerah	1.154.011,00	1.401.320,00	1.588.718,00	2.377.182,00	3.634.332,00
4.	Bagian Laba dari BUMD.	494.531,00	516.162,00	728.273,00	953.338,00	977.926,00
5.	Penerimaan dari Dinas–Dinas	492.032,00	461.917,00	480.019,00	529.747,00	562.406,00
6.	Penerimaan Lain–Lain.	1.074.262,00	1.290.806,00	1.416.769,00	1.350.038,00	1.286.689,00
7	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak.	2.321.212,00	2.639.951,00	1.888.057,00	4.272.547,00	4.501.392,00
8	Subsidi dari Pemerintah Pusat (Sumbangan dan Bantuan).	104.156.612,00	117.167.464,00	132.569.135,00	146.375.277,00	159.620.258,00
9	Penerimaan Pembangunan.	1.019.520,00	245.059,00	0,00	0,00	
	J U M L A H :	133.738.887,00	148.133.706,00	165.924.860,00	196.766.000,00	221.787.405,00

Penjelasan :

Perkembangan realisasi penerimaan PAD diluar Sisa Lebih Tahun Lalu, Subsidi dari Pemerintah Pusat dari Tahun ketahun sejak 1991/1992 ada kenaikan rata–rata lebih kurang 13,52 % hal ini disebabkan karena adanya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber PAD yang selalu dikembangan dan digali potensinya sehingga secara bertahap otonomi yang nyata dan bertanggung jawab akan tercapai.

A. PROYEKSI PENDAPATAN.

Dalam Ribuan Rupiah.

No.	PERINCIAN	1997/1998	1998/1999	1999/2000	2000/2001	2001/2002
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Yang Lalu	UP	UP	UP	UP	UP
2	Pajak Daerah	45.200.790,00	49.720.869,00	54.692.956,00	60.162.252,00	66.178.478,0
3.	Retribusi Daerah	1.999.418,00	2.199.340,00	2.419.274,00	2.661.201,00	2.927.322,0
4.	Bagian Laba dari BUMD.	1.842.702,00	1.340.350,00	1.474.385,00	1.621.824,00	1.784.007,0
5.	Penerimaan dari Dinas–Dinas	611.671,00	672.838,00	740.122,00	814.134,00	895.548,0
6.	Penerimaan Lain–Lain.	1.005.222,00	1.105.744,00	1.216.318,00	1.337.950,00	1.471.745,0
7	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak.	3.852.200,00	4.237.420,00	4.661.162,00	5.127.278,00	5.640.006,0
	JUMLAH :	54.512.003,00	59.276.561,00	65.204.217,00	71.724.639,00	78.897.106,0

PENJELASAN : Proyeksi Penerimaan PAD selama 5 (lima) tahun sejak Tahun Anggaran 1997/1998 dengan Perhitungan kenaikan rata–rata diperkirakan 10 %.

REALISASI BELANJA RUTIN.

Dalam Ribuan Rupiah.

No.	PERINCIAN	1991/1992	1992/1993	1993/1994	1994/1995	1995/1996
1.	Belanja Pegawai.	73.710.095,00	91.035.186,00	103.365.300,00	117.419.831,00	130.261.083,00
2	Belanja Barang.	8.337.064,00	9.636.337,00	12.369.400,00	13.560.555,00	14.617.513,00
3.	Belanja Pemeliharaan.	1.008.634,00	1.041.167,00	1.191.560,00	1.350.244,00	1.553.071,00
4.	Belanja Perjalanan Dinas.	389.459,00	487.333,00	597.650,00	699.525,00	877.762,00
5.	Belanja Lain–lain.	3.538.258,00	5.684.656,00	8.165.800,00	9.210.630,00	11.615.502,00
6.	Subsidi dan Sumbangan untuk Daerah Tingkat II.	1.254.880,00	3.522.617,00	5.045.700,00	6.645.085,00	10.831.392,00
	JUMLAH:	88.238.390,00	111.407.296,00	130.735.410,00	148.885.870,00	169.756.323,00

Penjelasan :

1. Perkembangan dari Pembelanjaan Rutin ada peningkatan dari tahun ketahun sejak realisasi tahun 1991/1992 sampai dengan tahun 1995/1996 naik kurang lebih 17,88 %

2. Untuk Belanja Lain–lain termasuk :
   - Pengeluaran yang Tidak Termasuk Bagian Lain.
   - Pengeluaran Tak Tersangka.
   - Angsuran pinjaman/Hutang dan Bunga.

A. PERKEMBANGAN TABUNGAN DARI PAD. [illegible]

No.	TAHUN ANGGARAN		BESARNYA TABUNGAN
1.	TAHUN ANGGARAN 1992/1993.		2.327.984.000,00
2.	TAHUN ANGGARAN 1993/1994.		2.954.285.925,00
3.	TAHUN ANGGARAN 1994/1995.		5.400.000.000,00
4.	TAHUN ANGGARAN 1995/1996.		5.936.815.000,00
5.	TAHUN ANGGARAN 1996/1997.		9.198.787.000,00
6.	TAHUN ANGGARAN 1997/1998.		13.075.349.000,00

PENJELASAN : Besarnya Tabungan Daerah tiap Tahun Anggaran tergantung kebutuhan Belanja Rutin Non Pegawai.

KERINGANAN BBNKB DAN KELENGKAPAN DOKUMEN PENDAFTARAN

A. KERINGANAN

Pemberian keringanan terhadap bea balik nama kendaraan bermotor untuk penyerahan kedua dan seterusnya dan bea balik nama kendaraan bermotor alat-alat alat berat.

1. Tujuan : Memberikan dorongan agar masyarakat segera memenuhi kewajiban melaksanakan mutasi / balik nama kendaraan bermotor yang telah menjadi miliknya serta untuk meningkatkan tertib administrasi pemilikan kendaraan bermotor.
2. Dasar Hukum : Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No.50/KPTS/1992 tanggal 3 Februari 1992.
3. Diberikan keringanan terhadap bea balik nama kendaraan bermotor untuk penyerahan kedua dan seterusnya dan bea balik nama kendaraan bermotor alat-alat berat.
4. Keringanan bea balik nama kendaraan bermotor kedua dan seterusnya sebesar 50% dari BBN yang terhutang.
5. Khusus untuk bea balik nama kendaraan bermotor alat-alat berat diberikan keringanan 50% dari BBN yang terhutang untuk penyerahan pertama, kedua dan seterusnya.

B. KELENGKAPAN DOKUMEN UNTUK PENDAFTARAN

1. **Persyaratan Untuk Semua Jenis Kendaraan.**
   Untuk semua jenis pendaftaran dibutuhkan identitas yang jelas bagi pemilik/ pemegang kendaraan, yaitu :
   a. Untuk perorangan:
      KTP asli atau surat keterangan identitas sah lainnya + 1 lembar photo copy.
   b. Untuk Badan hukum :
      1) Salinan akte pendirian ditambah satu eksemplar photo copy.
      2) Keterangan domisili.
      3) Surat kuasa yang bermeterai cukup dan ditanda tangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap.
   c. Untuk instansi pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD) :
      Surat tugas/ surat kuasa yang bermeterai cukup dari instansi yang bersangkutan.
2. **Persyaratan Berdasarkan Jenis Pendaftaran.**
   a. Pendaftaran kendaraan bermotor baru :
      1) Faktur
      2) PPUD/CKD (khusus roda 4)

3) Chek fisik kendaraan
4) Surat keterangan perubahan bentuk (untuk yang mengalami perubahan bentuk)
5) Surat keterangan angkutan penumpang umum (untuk kendaraan angkutan penumpang umum)
6) Sertifikat uji tipe buku dan tanda lulus berkala

b. Pengesahan STNK setiap tahun :
1) STNK
2) BPKB / surat keterangan bagi BPKB yang dijadikan jaminan Bank
3) Bukti pelunasan PKB/BBNKB, SWDKLLJ tahun sebelumnya dan premi asuransi (kendaraan umum)

c. Pendaftaran tukar nama jual beli :
1) Kwitansi pembelian
2) STNK
3) BPKB
4) Chek fisik kendaraan

d. Pendaftaran hibah / warisan
1) Surat hibah bermeterai cukup / akte notaris penghibahan
2) Surat keterangan kematian dan persetujuan ahli waris / akte notaris / keputusan pengadilan tinggi
3) STNK
4) BPKB
5) Chek fisik kendaraan

e. Pendaftaran kendaraan bermotor pindah dari luar daerah
1) Surat keterangan pindah sebagai ganti STNK
2) BPKB
3) Surat keterangan fiskal antar daerah
4) Chek fisik kendaraan
5) Kwitansi pembelian

f. Jenis pendaftaran selain a, b, c, d dan e serta penjelasan selengkapnya dapat ditanyakan di Kantor Bersama Samsat

3. **Tempat Pendaftaran / Pengambilan Formulir Pengurusan STNK, Pembayaran PKB/BBNKB dan SWDKKLJ. Dilayani di Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Dati II, untuk :**

a. SAMSAT Kotamadya Yogyakarta di JL. Tentara Pelajar 13 Yogyakarta
b. SAMSAT Sleman di jl. Bayangkara (jl. Magelang Km. 14) Sleman
c. SAMSAT Bantul di JL. Badegan Bantul
d. SAMSAT Kulon Progo di Jl. Bayangkara Wates
e. SAMSAT Gunung Kidul JL.MGR. Sugiyo Pranoto 19 Wonosari Gunung Kidul

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kepatihan Danurejan Telepon : 589583, 562811 (Psw. 209 - 217)
YOGYAKARTA

SURAT KETERANGAN / IZIN

Nomor : 070 / 2644

Membaca Surat : Dekan Fak.Ekonomi - Univ.Sanata Dharma Yk , No. 164/PD.I/FE/VIII/97 Tanggal 22 Agustus 1997 Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 1983 tentang Pedoman Pendataan Sumber dan Potensi Daerah.
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
3. Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33/KPTS/1986 tentang : Tatalaksana Pemberian Ikin bagi setiap Instansi Pemerintah maupun non Pemerintah yang melakukan Pendataan / Penelitian.

Diizinkan kepada :

Nama : Florentina Dyah Wanita Wulan , NIM. 93 2114 024

Alamat Instansi : Mrican Tromol Pos 29, Yogyakarta

Judul : PERKEMBANGAN PENDAPATAN PAJAK DAERAH DAN PREDIKSI PENDAPATAN PAJAK DAERAH STUDI KASUS PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

Lokasi : Ketamadya Yogyakarta

Waktu : Mulai pada tanggal 25-8-1997 s/d 25-11-1997

Dengan ketentuan :

1. Terlebih dahulu menemui/melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah) untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat.
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (c/q. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta).
4. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah.
5. Surat Izin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
6. Surat Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 23-8-1997

An. GUBERNUR
KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KETUA/WAKIL KETUA BAPPEDA PROPINSI DIY.

Ub. Kasi. Pispra.

Ir. Rachmat Ali Sahlan
NIP. 490 022 622

TEMBUSAN kepada Yth. :
1. Bapak Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta: (sebagai laporan)
2. Ka. Dit. Sospol Propinsi DIY.
3. Walikotamadya Yk c/q Bappeda
4. Ka. DIPENDA Prop.DIY
5. Dekan Fak.Ekonomi - Univ.Sanata Dharma
6. Ybs
7. Pertinggal

PEDOMAN WAWANCARA

A. Gambaran Umum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

1. Bagaimana Sejarah Pembentukan Propinsi DIY ?
2. Geografi
   a. Dimana letak propinsi DIY?
   b. Wilayah dibatasi oleh apa saja?
   c. Berapa luas wilayahnya?
3. Penduduk
   a. Berapa jumlah penduduk pada tahun 1996 ?
   b. Bagaimana komposisi penduduknya ?
   c. Berapa kepadatan penduduknya ?
   d. Berapa angkatan kerja / pencari kerja pada tahun 1996 ?
4. Kekayaan Alam
   a. Bagaimana jenis tanah yang ada dan dimanfaatkan untuk apa ?
   b. Bagaimana kondisi air yang ada ?
   c. Apa saja jenis-jenis flora dan faunanya ?
   d. Bahan tambang apa saja yang ada ?
5. Nilai Budaya
   a. Kesenian apa saja yang dimiliki ?
   b. Bagaimana Pakaian adatnya ?
   c. Apa saja senjata tradisionalnya ?
   d. Bagaimana bentuk bangunan / Rumah yang ada ?

6. Ekonomi

   a. Bagaimana sektor pertaniannya ?

   b. Industri apa saja yang ada ?

   c. Bagaimana usaha sektor pertambangan yang telah dilakukan ?

   d. Bagaimana sarana perhubungan yang ada ?

   e. Bagaimana tempat pariwisatanya ?

   f. Perdagangan apa saja yang dilakukan ?

7. Politik

   a. Bagaimana kebijakan dasar politik yang berlaku ?

   b. Bagaimana pemerintahan yang ada ?

   c. Bagaimana penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan ?

B. PAJAK DAERAH

1. Ada berapa sektor pajak yang dipungut oleh Pemda Tingkat I ?
2. Apa dasar hukum yang melandasi pemungutan pajak tersebut ?
3. Berapa anggaran pendapatan pajak daerah yang telah ditetapkan untuk tahun anggaran 1992/1993 sampai 1996/1997 ?
4. Berapa Realisasi pendapatan pajak daerah pada tahun anggaran 1992/1993 sampai 1996/1997 ?
5. Antara realisasi dengan anggaran yang telah ditetapkan apakah mengalami kenaikan atau penurunan ?
6. Apa saja yang menyebabkan kenaikan atau penurunan pendapatan pajak daerah tersebut ?

6. Ekonomi

   a. Bagaimana sektor pertaniannya ?

   b. Industri apa saja yang ada ?

   c. Bagaimana usaha sektor pertambangan yang telah dilakukan ?

   d. Bagaimana sarana perhubungan yang ada ?

   e. Bagaimana tempat pariwisatanya ?

   f. Perdagangan apa saja yang dilakukan ?

7. Politik

   a. Bagaimana kebijakan dasar politik yang berlaku ?

   b. Bagaimana pemerintahan yang ada ?

   c. Bagaimana penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan ?

B. PAJAK DAERAH

1. Ada berapa sektor pajak yang dipungut oleh Pemda Tingkat I ?
2. Apa dasar hukum yang melandasi pemungutan pajak tersebut ?
3. Berapa anggaran pendapatan pajak daerah yang telah ditetapkan untuk tahun anggaran 1992/1993 sampai 1996/1997 ?
4. Berapa Realisasi pendapatan pajak daerah pada tahun anggaran 1992/1993 sampai 1996/1997 ?
5. Antara realisasi dengan anggaran yang telah ditetapkan apakah mengalami kenaikan atau penurunan ?
6. Apa saja yang menyebabkan kenaikan atau penurunan pendapatan pajak daerah tersebut ?

7. Bagaimana proyeksi / prediksi pendapatan pajak daerah yang telah dibuat oleh pemerintah daerah tingkat I untuk tahun anggaran 1997/1998 sampai 2001/2002 ?
8. Berapa jumlah kendaraan yang ada dan seberapa besar sumbangannya terhadap pendapatan pajak daerah ?
9. Berapa Jumlah pendaftaran BBNKB dan seberapa besar sumbangannya terhadap pendapatan pajak daerah ?
10. Usaha apa saja yang telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah ?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

UNIVERSITAS SANATA DHARMA PERPUSTAKAAN YOGYAKARTA

Data pribadi

Nama	: Florentina Dyah Wanita Wulan
Umur	: 24 tahun
Tinggi dan Berat badan	: 152 cm dan 39 kg
Tempat dan Tgl. lahir	: Sleman, 30 Desember 1973
Jenis kelamin	: Perempuan
Status	: Belum menikah
Kewarganegaraan	: WNI
Agama	: Katolik
Alamat sekarang	: Wringin Lor, Purwobinangun, Pakem Sleman, Yogyakarta, 55582

Pendidikan

1. SD Negeri Tawangharjo, lulus tahun 1986.
2. SMP Negeri 2 Pakem, lulus tahun 1989.
3. SMA Negeri Donoharjo, lulus tahun 1992.
4. Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, lulus tahun ~~1999~~. 99

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 18 Oktober 1997

Saya yang bersangkutan,

Florentina Dyah Wanita Wulan